



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Kabupaten Gayo Lues

TAHUN 2009



KERJASAMA
BADAN PUSAT STATISTIK
DENGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2009

BAPPEDA
BEKERJASAMA DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN GAYO LUES



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2009

Katalog BPS	: 4102002.1113
Ukuran Buku	: 21 x 15
Jumlah Halaman	: X + 109 halaman
Naskah	: BPS Kabupaten Gayo Lues
Penyunting	: BPS Kabupaten Gayo Lues
Gambar Kulit	: BPS Kabupaten Gayo Lues
Diterbitkan Oleh	: BPS Kabupaten Gayo Lues

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA SAMBUTAN

Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gayo Lues ini merupakan hasil kerja sama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues.

Pada masa lalu, saat ini, dan dimasa mendatang peran informasi statistik semakin penting dalam pembangunan. Penerbitan publikasi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pembangunan daerah, baik dari aspek perencanaan maupun evaluasi serta dapat memperkaya khasanah informasi statistik yang tersedia.

Kepada segenap jajaran Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, kami ucapkan terima kasih atas peran sertanya hingga terwujud penerbitan ini. Semoga kerja sama yang telah terjalin selama ini dapat ditingkatkan lagi dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak, kritik dan saran demi perbaikan dimasa datang sangat kami hargai.

Blangkejeren, Oktober 2010

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN GAYO LUES

H. Abd. Manaf, SE
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19560806 198003 1 003

KATA PENGANTAR

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gayo Lues 2009 menyajikan informasi mengenai kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Gayo Lues tahun 2009, dengan membandingkan perkembangan komponen IPM Kabupaten Gayo Lues selama kurun waktu 2008-2009 dalam bentuk indikator komposit. Pada publikasi ini disajikan juga kinerja pembangunan manusia diseluruh kabupaten/kota lain dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2009 sebagai pembanding.

Kepada semua pihak, khususnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues dalam hal ini jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gayo Lues yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan publikasi ini kami ucapkan banyak terima kasih.

Disadari masih terdapat kekurangan dalam publikasi ini, untuk itu kritik dan saran demi perbaikan di masa mendatang senantiasa kami terima dengan tangan terbuka. Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat bagi pengambil kebijakan dan pengguna data lainnya.

Blangkejeren, Oktober 2010
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN GAYO LUES

Ir. Maimun

NIP. 19690401 199401 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan dan Kegunaan	9
1.3 Sistematika	10
BAB II. TINJAUAN UMUM IPM	
2.1 Konsep Pembangunan Manusia	15
2.2 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia.....	18
BAB III. METODOLOGI	
3.1 Sumber Data	23
3.2 Komponen IPM	23
3.3 Penghitungan Indeks	28
3.4 Kecepatan Pertumbuhan IPM (<i>Shortfall</i>).....	29
BAB IV. GAMBARAN UMUM	
4.1 Gambaran Umum Wilayah.....	33
4.2 Gambaran Umum Kependudukan	35
4.3 Penduduk Menurut Kecamatan	36
4.4 Kepadatan Penduduk.....	38
4.5 Potensi Sosial Ekonomi	39
4.5.1. Potensi Sosial	39
4.5.2. Potensi Ekonomi.....	43

BAB V. IPM KABUPATEN GAYO LUES	
5.1	Komponen Penghitungan IPM..... 49
5.1.1.	Angka Harapan Hidup..... 49
5.1.2.	Angka Melek Huruf & Rata-Rata Lama Sekolah 54
5.1.3.	Daya Beli 63
5.2	IPM Kabupaten Gayo Lues 65
5.2.1.	IPM Kabupaten Gayo Lues Tahun 2006- 2007 65
5.2.2.	Perbandingan IPM Antar Kabupaten/ Kota 67
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1	Kesimpulan..... 75
6.2	Saran-saran 76
LAMPIRAN 81	
DAFTAR ISTILAH PENTING 102	
DAFTAR PUSTAKA 109	

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 4.1. Distribusi Luas Wilayah Menurut Kecamatan.	33
Gambar 4.2. Jarak Ibukota Kecamatan ke Blang Kejeren (km).....	35
Gambar4.3. Penduduk Kabupaten Gayo Lues Menurut Jenis Kelamin Tahun 2007-2008	36
Gambar 4.4. Distribusi Penduduk Kabupaten Gayo Lues Menurut Kecamatan Tahun 2008	37
Gambar 4.5. Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2008	38
Gambar 4.6. Kepadatan Penduduk Kabupaten Gayo Lues Menurut Kecamatan Tahun 2008	39
Gambar 4.7. Persentase Angkatan Kerja yang Bekerja dan Pengangguran Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009	40
Gambar 4.8. Tingkat Partisipasi Sekolah Penduduk Usia Sekolah Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009 (Persen)	43
Gambar 4.9. Peranan Sektor Ekonomi dalam Pembentukan PDRB Kabupaten Gayo Lues Tahun 2004–2008 (Persen)	44
Gambar 4.10. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gayo Lues Tahun 2002-2008 (Persen).....	45
Gambar 5.1. Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi NAD dan Indonesia Tahun 2008-2009	51

Gambar 5.2.	Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir Tahun 2009	52
Gambar 5.3.	Cakupan Imunisasi DPT, Polio,Campak dan Hepatitis B Tahun 2009	53
Gambar 5.4.	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di NAD Tahun 2008-2009.....	56
Gambar 5.5.	APS Kabupaten Gayo Lues dan Provinsi NAD Tahun 2009	59
Gambar 5.6.	Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2009.....	61
Gambar 5.7.	Proporsi Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2009.....	62
Gambar 5.8.	Pengeluaran Riil Per Kapita Disesuaikan Tahun 2004-2009 (Rp ribu)	64
Gambar 5.9.	Perkembangan IPM Kabupaten Gayo Lues dan NAD Tahun 2008-2009	66
Gambar 5.10.	Posisi IPM Kabupaten Gayo Lues Dibandingkan Dengan IPM NAD, Tahun 2008-2009	67
Gambar 5.11.	Urutan IPM Kabupaten/Kota Se-Prov. NAD 2008-2009	68
Gambar 5.12.	IPM Kabupaten/Kota Tahun 2009 dan Perubahan (Shortfall) Tahun 2008-2009.....	72

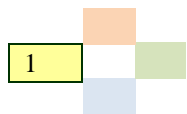
DAFTAR LAMPIRAN

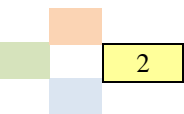
	Hal
Tabel 1. Luas Wilayah dan Jumlah Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2009	83
Tabel 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008-2009.....	83
Tabel 3. Komposisi Penduduk Kabupaten Gayo Lues Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, Rasio Jenis Kelamin dan Luas Wilayah Tahun 2008	84
Tabel 4. Peranan Sektor Ekonomi Dalam Pembentukan PDRB Kabupaten Gayo Lues Tahun 2004-2008 (Persen).....	85
Tabel 5. Persentase Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009	86
Tabel 6. Angka Harapan Hidup Tahun 2008-2009	87
Tabel 7. Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota di NAD Tahun 2008-2009	88
Tabel 8. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Menurut Kabupaten/Kota di NAD Tahun 2008-2009.....	89
Tabel 9. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2009	90
Tabel 10. Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2009.....	91

Tabel 11.	Pengeluaran Riil Per Kapita Disesuaikan Tahun 2008-2009	92
Tabel 12.	IPM dan Reduksi <i>Shortfall</i> Menurut Kabupaten/ Kota 2008-2009	93
Tabel 13.	IPM Menurut Katagori dan Kabupaten/Kota 2008-2009	94
Tabel 14.	IPM 2009, Perubahan (<i>Shortfall</i>) 2008-2009, dan Letak Kuadran.....	95
Tabel 15.	Konversi Lama Sekolah dengan Jenjang Pendidikan.....	96
Tabel 16.	Daftar Komoditi Terpilih Untuk Menghitung Paritas Daya Beli (PPP)	97
Tabel 17.	Pengeluaran Per Kapita Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009	98
Tabel 18.	IPM Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2005-2009	99
Tabel 19.	IPM/ <i>HDI</i> (<i>Human Development Index</i>) Beberapa Negara Tahun 2009.....	100



BAB I. PENDAHULUAN





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan manusia (*Human Development*) berdasarkan sudut pandang atau perspektif dari *United Nations Development Program* (UNDP) dirumuskan sebagai suatu proses untuk membuat manusia mampu memiliki lebih banyak pilihan. Pendapatan (*income*) adalah salah satu dari pilihan yang dimiliki manusia, tetapi bukanlah suatu totalitas dari semua aspek kehidupan manusia. Selain itu aspek kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik yang baik dan kebebasan untuk bertindak juga merupakan hal-hal yang tidak kalah pentingnya (UNDP *Human Development Report-HDR*, 2001).

Pembangunan Indonesia, dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan dengan menciptakan individu manusia Indonesia seutuhnya yang dapat mengembangkan potensinya secara optimal perlu direncanakan. Dalam hal ini, keluarga sebagai masyarakat terkecil bertanggung jawab atas perkembangan optimal dari potensi individu.

Sedangkan masyarakat perlu memberikan dukungan sosial dan ekonomi yang dibutuhkan untuk menjamin kebutuhan dasar keluarga yang selalu berubah sesuai dengan perubahan tahapan siklus kehidupan keluarga. Pada sisi lain pemerintah pada semua jenjang administrasi bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan dan menyediakan

pelayanan yang dapat menjamin mekanisme dukungan sosial budaya untuk melindungi keluarga dan individu.

Kedudukan dan peran IPM dalam konteks perencanaan daerah dinilai sangat penting. Bahkan, pemerintah telah menetapkan IPM sebagai salah satu variabel/indikator dalam pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, khususnya Pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Lebih lanjut, ayat (2) menyatakan bahwa celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Sementara ayat (3) menyebutkan, bahwa kebutuhan fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia.

Formula yang serupa juga diterapkan Pemerintah Provinsi Aceh dalam pengalokasian dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Pemerintah Kabupaten/kota. Hal ini tersirat dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Dalam Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) disebutkan sebagai berikut:

- (1) Pengalokasian Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan perimbangan sebagai berikut :
 - a. Paling banyak 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Aceh;
 - b. Paling sedikit 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi antar kabupaten/kota setiap tahun dengan menggunakan suatu formula yang memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antar kabupaten/kota.
- (3) Formula perhitungan besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan beberapa indikator seperti jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan indikator lainnya yang relevan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sejalan dengan ciri pembangunan nasional yang menempatkan manusia sebagai titik sentral, maka dalam kerangka pembangunan manusia, pembangunan ditujukan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam semua proses pembangunan. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut

dilakukan dengan jalan meningkatkan kualitas penduduk sebagai sumber daya yang multi aspek yaitu:

1. Aspek Fisik (kesehatan)
2. Aspek Intelektualitas (pendidikan)
3. Aspek Kesejahteraan Ekonomi (berdaya beli)
4. Aspek Moralitas (iman dan takwa).

Disisi lain, perbaikan kualitas penduduk tersebut juga diiringi dengan pemanfaatan (*utilization*) kemampuan/keterampilan mereka. Dilihat dari sisi pelaku atau sasaran yang ingin dicapai, pembangunan manusia juga merupakan sebuah model pembangunan tentang penduduk, untuk penduduk, dan oleh penduduk. Lebih rinci hal tersebut diuraikan menjadi:

1. Tentang penduduk, berupa investasi dibidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial lainnya.
2. Untuk penduduk, berupa penciptaan peluang kerja melalui pertumbuhan ekonomi.
3. Oleh penduduk, berupa upaya untuk memberdayakan (*empowerment*) penduduk dengan cara ikut serta berpartisipasi dalam proses politik dan pembangunan.

Menurut UNDP, upaya kearah perluasan pilihan tersebut hanya dapat direalisasikan jika penduduk paling tidak memiliki peluang berumur panjang dan sehat, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan peluang untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif. Untuk mengukur tingkat pemenuhan ketiga unsur diatas, UNDP menyusun suatu indeks komposit yang

merangkum ketiga peluang diatas yang lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusi (IPM)/*Human Development Index (HDI)* .

IPM mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu bidang kesehatan, pendidikan dan standar hidup. Ketiganya diukur dengan angka harapan hidup, pencapaian pendidikan dan pendapatan per kapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. IPM adalah suatu ringkasan dan bukan suatu ukuran komprehensif dari pembangunan manusia (UNDP *Human Development Report-HDR*, 2001). Dengan kata lain, IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup (e_0), indeks pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak.

Komponen dan Indikator IPM

Komponen IPM adalah usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*). Usia hidup diukur dengan angka harapan hidup atau e_0 yang dihitung menggunakan metode tidak langsung (metode *Brass*, varian *Trussel*) berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup.

Komponen pengetahuan diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang dihitung berdasarkan data susenas KOR. Sebagai catatan, UNDP dalam publikasi

tahunan HDR sejak 1995 menggunakan indikator partisipasi sekolah dasar, menengah, dan tinggi sebagai pengganti rata-rata global. Indikator angka melek huruf diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan; yaitu, tingkat/kelas yang sedang/ pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Komponen standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Sebagai catatan, UNDP menggunakan indikator PDB per kapita riil yang telah disesuaikan (*Adjusted Real GDP per Capita*) sebagai ukuran komponen tersebut karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara.

Indikator Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting yang dapat digunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah. Indikator ini dipopulerkan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) melalui Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Report-HDR*) yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1990 (HDR, 1990). Sejak tahun 1990, UNDP mengadopsi suatu paradigma baru mengenai pembangunan, yang disebut Paradigma Pembangunan Manusia (PPM). Hal ini berbeda dengan paradigma pembangunan sebelumnya, yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang

menempatkan pendapatan (diukur dengan GNP atau GDP per kapita) sebagai ukuran hasil pembangunan.

Namun demikian konsep IPM dapat dianggap sebagai suatu konsep yang lebih komprehensif karena disamping memperhitungkan keberhasilan pembangunan manusia dari aspek non ekonomi, juga memperhitungkan keberhasilan pembangunan manusia dari aspek ekonomi. IPM merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur upaya program pembangunan dari aspek manusia. IPM mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap paling mendasar, yaitu usia hidup, pengetahuan, dan hidup layak.

Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang konsep, komponen-komponen, metode penghitungan, dan peranan IPM untuk program pembangunan daerah, khususnya bagi pembangunan daerah di Kabupaten Gayo Lues.

1.2. Tujuan dan Kegunaan

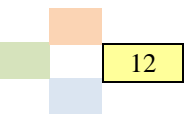
Penyusunan IPM ini diharapkan mampu menyajikan pencapaian dan perbandingan kinerja pembangunan manusia sesuai perspektif UNDP di Kabupaten Gayo Lues khususnya selama kurun waktu 2008-2009. Selain itu IPM Kabupaten Gayo Lues juga diharapkan mampu memberikan opini kepada pemerintah daerah setempat sebagai *decision maker* dalam berbagai kebijakan program pembangunan.

1.3. Sistematika

Analisis ini akan dikemas menjadi enam bab mulai dari Pendahuluan hingga Kesimpulan dengan susunan sebagai berikut:

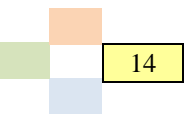
1. Bab I. PENDAHULUAN, akan menguraikan mengenai latar belakang dan tujuan analisis serta pengertian Indeks Pembangunan Manusia secara umum.
2. Bab II. TINJAUAN UMUM IPM, membahas mengenai penghitungan IPM serta perkembangan studi ini terutama yang sudah dilakukan oleh UNDP yang bekerja sama dengan BPS dan Bappenas.
3. Bab III. METODOLOGI, membahas mengenai sumber data, konsep-konsep yang digunakan, serta metode penghitungan dan analisis.
4. Bab IV. GAMBARAN UMUM, yang membahas mengenai gambaran umum wilayah Kabupaten Gayo Lues serta potensi sosial ekonomi yang terdapat didalamnya.
5. Bab V. IPM KABUPATEN GAYO LUES, akan membahas mengenai komponen IPM dan perkembangan IPM Kabupaten Gayo Lues selama 2008 dan 2009 serta perbandingannya dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta kabupaten lain di Provinsi NAD.
6. Bab VI. KESIMPULAN DAN SARAN, berisi kesimpulan dan berbagai saran kebijakan.

Penyusunan analisis ini juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran untuk memperjelas pembahasan yang telah disajikan dalam bab-bab sebelumnya.



BAB II. TINJAUAN UMUM IPM





BAB II

TINJAUAN UMUM IPM

2.1. Konsep Pembangunan Manusia

Menurut UNDP (1990:1), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*a process of enlarging people's choices*). Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan suatu negara adalah penduduk karena penduduk adalah kekayaan nyata suatu negara. Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana dikutip dari UNDP (1995:118), sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia diantaranya adalah:

- Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian;
- Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka; oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja;

- Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal;
- Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu: produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan; dan
- Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Untuk itu diperlukan suatu indikator komposit yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara berkelanjutan. IPM adalah suatu indikator pembangunan manusia yang diperkenalkan UNDP pada tahun 1990. Pada dasarnya IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan hidup layak (*decent living*). Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir; pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas; dan hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang didasarkan pada *Purchasing Power Parity* (paritas daya beli dalam rupiah).

Konsep IPM berhasil diterapkan untuk memeringkatkan negara-negara yang secara keseluruhan dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok besar. Kelompok pertama adalah negara-negara yang tingkat pembangunan manusianya rendah (IPM = 0-0,5), menengah (IPM = 0,50-0,79), dan negara dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi (IPM = 0,8-1,0). Namun perlu dicatat bahwa IPM hanya mengukur tingkat pembangunan manusia relatif, bukan absolut, dan fokusnya adalah pada hasil akhir pembangunan (ketahanan hidup, pengetahuan dan kebebasan pilihan materi atau kualitas standar hidup) bukannya sarana (pendapatan atau GNP per kapita semata).

Meskipun banyak kritik dan kelemahan yang dikemukakan oleh banyak pihak terhadap IPM, namun konsep IPM sesungguhnya masih dapat digunakan dan dimanfaatkan. Apalagi jika dibarengi dengan ukuran-ukuran ekonomi tradisional seperti pendapatan perkapita. Tiga kriteria IPM yakni ketahanan hidup, pendidikan, dan kualitas hidup fisik mampu membantu mengungkap pemahaman kita akan aspek-aspek penting dari pembangunan (Todaro, 2002).

Indikator ini digunakan untuk mengukur peringkat kesejahteraan di sekitar 177 negara. Indeks Pembangunan Manusia juga bisa diartikan untuk mengukur kemajuan jangka panjang. Adapun hal-hal yang dipertimbangkan dalam mengkalkulasikan Indeks Pembangunan Manusia ada 4 faktor yaitu: usia harapan hidup, tingkat melek huruf, tingkat partisipasi

penduduk dalam pendidikan dan pendapatan perkapita. Jadi, dalam Indeks Pembangunan Manusia, kalau kita melihat pada pendapatan perkapita saja, itu hanya melihat kemajuan atau status ekonomi negara berdasarkan pendapatan per tahun. Kalau seperti berdasarkan besaran empat faktor tersebut, dimensinya jauh lebih beragam. Karena yang dipentingkan di sini ialah kualitas hidup (Suhartono, 2006).

2.2. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia

Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk (1) memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; (2) Hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum; (3) Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman; (4) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau; (5) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan; (6) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan; (7) Hak rakyat untuk memperoleh keadilan; (8) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan; (9) Hak rakyat untuk berinovasi; (10) Hak rakyat menjalankan hubungan spiritualnya dengan Tuhan; dan (11) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik (Sahdan, 2005).

Kemiskinan menjadi alasan yang sempurna rendahnya *Human Development Index (HDI)*, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Secara menyeluruh kualitas manusia

Indonesia relatif masih rendah, dibandingkan dengan kualitas manusia di negara-negara lain di dunia. Berdasarkan *Human Development Report 2009* yang menggunakan data tahun 2007, angka *Human Development Index (HDI)* Indonesia adalah 73,4. Seperti tahun 2006, Indonesia berada pada kelompok *medium human development* dan tetap berada pada peringkat ke-111 dari 182 negara (UNDP, 2009). Angka indeks tersebut merupakan komposit dari angka harapan hidup saat lahir sebesar 70,5 tahun, angka melek huruf penduduk dewasa (usia 15 tahun ke atas) sebesar 92,0 persen, kombinasi angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi sebesar 68,2 persen, dan Pendapatan Domestik Bruto per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli (*purchasing power parity*) sebesar US\$ 3.712.

Di ASEAN Indonesia berada pada posisi ke-6. Posisi Indonesia ini jauh dibawah Singapura yang menempati urutan ke 23, Brunei Darussalam (30), Malaysia (66), Thailand (87), dan Philipina (105). IPM Indonesia hanya 73,4 persen, jauh dibawah Singapura (94,4), Brunei Darussalam (92,0), Malaysia (82,9), Thailand (78,3), dan Philipina (75,1). Negara Vietnam kembali berhasil dilampaui Indonesia setelah beberapa waktu sebelumnya mengungguli Indonesia. Sehingga di ASEAN, Indonesia unggul dari Vietnam (72,5), Laos (61,9), Kamboja (59,3), Myanmar (58,6) dan Timor-Leste (48,9).

Posisi pertama IPM di dunia adalah Norwegia yang mempunyai IPM sebesar 97,1. Disusul Australia di peringkat

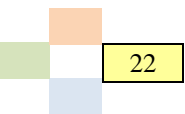
kedua dengan IPM sebesar 97,0 dan Islandia pada posisi berikutnya (96,9). Sebaliknya IPM terendah adalah negara Niger yang berada di urutan 182 dengan IPM 34,0.

Sementara itu, berdasarkan data IPM 2009 di Indonesia yang bersumber dari BPS (2010), DKI Jakarta menempati posisi teratas dengan angka 77,36 dan terendah Provinsi Papua dengan angka 64,53. Sedangkan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menempati posisi ke-17 dengan IPM 71,31.

Sepuluh besar IPM provinsi tertinggi di Indonesia adalah, DKI Jakarta (77,36), Sulawesi Utara (75,68), Riau (75,60), DI Yogyakarta (75,23), Kalimantan Timur (75,11), Kepulauan Riau (74,54), Kalimantan Tengah (74,36), Sumatera Utara (73,80), Sumatera Barat (73,44), dan Provinsi Sumatera Selatan (72,61).

BAB III METODOLOGI





BAB III METODOLOGI

3.1. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam penyusunan IPM ini adalah hasil Susenas Tahun 2008 dan 2009. Variabel yang diamati dari data tersebut adalah :

1. Rata-rata anak lahir hidup (RALH) dan rata-rata anak masih hidup (RAMH) untuk menghitung usia harapan hidup.
2. Jenjang pendidikan dan kelas tertinggi serta status sekolah dari penduduk dewasa (usia 25 keatas).
3. Kemampuan baca tulis penduduk usia 15 tahun keatas.
4. Pengeluaran rata-rata per kapita per bulan.
5. Data-data lain sebagai pelengkap atau pembanding.

Sedangkan standar yang dipakai sebagai acuan untuk menyusun indeks menggunakan standar yang telah dibuat BPS dengan pertimbangan supaya angka-angka Kabupaten Gayo Lues konsisten dengan angka Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang telah disusun oleh BPS.

3.2. Komponen IPM

Komponen IPM terdiri dari usia harapan hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*). Komponen usia hidup diukur dengan Angka Harapan Hidup (e^0), komponen pengetahuan diukur

dengan angka melek huruf dan rata-rata lama bersekolah, sedangkan komponen standar hidup layak diukur dengan rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan.

Angka Harapan Hidup dihitung menggunakan metode tidak langsung menggunakan metode Brass Varian Trussel, dengan *life table Coale-Demeney West Model*. Data dasar yang digunakan adalah RALH dan RAMH menurut kelompok umur ibu (15-19, 20-24,.....,45-49).

Angka Melek Huruf penduduk usia 15 tahun keatas diolah dari hasil Susenas Kor pada variabel umur dan kemampuan baca tulis penduduk. Seseorang dikategorikan mampu baca tulis jika ia mampu membaca dan menulis sesuatu jenis huruf.

Rata-rata lama bersekolah dihitung menggunakan 4 variabel secara simultan yaitu :

1. Status sekolah (tidak/belum pernah sekolah, masih sekolah, dan tidak bersekolah lagi).
2. Jenjang pendidikan yang pernah/sedang dijalani.
3. Kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki, dan
4. Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Konversi yang digunakan untuk menentukan lama bersekolah bisa dilihat pada lampiran.

Penghitungan indikator konsumsi riil per kapita yang telah disesuaikan dilakukan melalui tahapan pekerjaan sebagai berikut:

- ❖ Menghitung pengeluaran konsumsi per kapita dari susenas Modul (=A).

- ❖ Mendeflasikan nilai A dengan IHK ibukota propinsi yang sesuai (=B).
- ❖ Menghitung daya beli per unit (=PPP/unit). Metode penghitungan sama seperti metode yang digunakan *International Comparison Project* (ICP) dalam menstandarkan nilai 27 komoditi yang diperoleh dari Susenas Modul .
- ❖ Membagi nilai B dengan PPP/Unit (=C).
- ❖ Menyesuaikan nilai C dengan formula Atkinson sebagai upaya untuk memperkirakan nilai *marginal utility* dari C.

Penghitungan PPP/unit dilakukan dengan rumus :

$$\text{PPP/unit} = \frac{\sum_j E_{(i,j)}}{\sum_j P_{(i,j)} Q_{(i,j)}}$$

Dimana :

$$\sum E_{(i,j)}$$

: pengeluaran untuk komoditi j di propinsi ke-i

$$P_{(i,j)}$$

: harga komoditi j di Kabupaten Gayo Lues

$$Q_{(i,j)}$$

: jumlah komoditi j (unit) yang dikonsumsi di propinsi ke-i

Unit kuantitas rumah dihitung berdasarkan indeks kualitas rumah yang dibentuk dari tujuh komponen kualitas tempat tinggal yang diperoleh dari Susenas KOR. Ketujuh komponen kualitas yang digunakan dalam penghitungan indeks kualitas rumah diberi skor sebagai berikut:

- Lantai : keramik, marmer, atau granit = 1, lainnya = 0
- Luas lantai per kapita : $\geq 10 \text{ m}^2$ = 1, lainnya = 0
- Dinding : tembok = 1, lainnya = 0
- Atap : kayu/sirap, beton = 1, lainnya = 0
- Fasilitas penerangan : listrik = 1, lainnya = 0
- Fasilitas air minum : leding = 1, lainnya = 0
- Jamban : milik sendiri = 1, lainnya = 0
- Skor awal untuk setiap rumah = 1

Indeks kualitas rumah merupakan penjumlahan dari skor yang dimiliki oleh suatu rumah tinggal dan bernilai antara 1 sampai dengan 8. Kuantitas dari rumah yang dikonsumsi oleh suatu rumah tangga adalah indeks Kualitas dari rumah dibagi 8.

Sebagai contoh, jika suatu rumah tangga menempati suatu rumah tinggal yang mempunyai Indeks Kualitas Rumah = 6, maka kuantitas rumah yang dikonsumsi oleh rumah tangga tersebut adalah $6/8$ atau 0,75 unit.

Rumus Atkinson yang digunakan untuk penyesuaian rata-rata konsumsi riil secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
C_{(1)} &= C_{(i)} && \text{jika } C_{(i)} \leq Z \\
&= Z + 2(C_{(i)} - Z)^{(1/2)} && \text{jika } Z < C_{(i)} \leq 2Z \\
&= Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(C_{(i)} - 2Z)^{(1/3)} && \text{jika } 2Z < C_{(i)} \leq 3Z \\
&= Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(Z)^{(1/3)} + 4(C_{(1)} - 3Z)^{(1/4)} && \text{jika } 3Z < C_{(i)} \leq 4Z
\end{aligned}$$

dimana :

$C_{(i)}$: Konsumsi per kapita riil yang telah disesuaikan dengan PPP/unit.

Z : Threshold atau tingkat pendapatan tertentu yang digunakan sebagai batas kecukupan yang dalam publikasi ini nilai Z ditetapkan secara arbiter sebesar Rp.547.500,- per kapita setahun, atau Rp.1.500,- per kapita per hari.

Rumus dan Ilustrasi Penghitungan IPM

Rumus penghitungan IPM dapat disajikan sebagai berikut:

$$IPM = 1/3 [X(1)+X(2)+X(3)]$$

Dimana :

$X(1)$: Indeks harapan hidup

$X(2)$: Indeks pendidikan = $2/3$ (indeks melek huruf) + $1/3$ (indeks rata-rata lama sekolah)

$X(3)$: Indeks standar hidup layak.

3.3. Penghitungan Indeks

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut:

$$\text{Indeks } X_{(i)} = [X_{(i)} - X_{(i) \text{ min}}] / [X_{(i) \text{ maks}} - X_{(i) \text{ min}}]$$

Dimana :

$X_{(i)}$: Indikator ke-i (dimana $i = 1,2,3$)

$X_{(i) \text{ maks}}$: Nilai maksimum $X_{(i)}$

$X_{(i) \text{ min}}$: Nilai minimum $X_{(i)}$

Tabel 3.1. Nilai maksimum dan nilai minimum indikator $X_{(i)}$

Indikator Komponen IPM (=X)	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup	85	25	Standar UNDP
Angka Melek Huruf	100	0	Standar UNDP
Rata-rata lama sekolah	15	0	Standar UNDP
Konsumsi per kapita yang disesuaikan	737.720 ^{a)}	300.000 (1996) 360.000 ^{b)} (1999)	UNDP menggunakan PDB/kapita riil yang disesuaikan

Catatan :

- a) Proyeksi pengeluaran riil/unit/tahun untuk provinsi yang memiliki angka tertinggi (Jakarta) pada tahun 2018 setelah disesuaikan dengan formula Atkinson. Proyeksi mengasumsikan kenaikan 6,5 persen pertahun selama kurun 1993-2018.
- b) Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru.

Sebagai ilustrasi penghitungan dapat diambil kasus Propinsi D.I Yogyakarta Tahun 2005 yang memiliki indeks masing-masing komponen sebagai berikut :

- a. Indeks angka harapan hidup (X1) : 79,8 %
- b. Indeks tingkat pendidikan (X2) : 76,5 %
- d. Indeks Pendapatan (X3) : 64,2 %

Akhirnya angka IPM dapat dihitung menggunakan persamaan awal:

$$IPM = 1/3 (79,8 + 76,5 + 64,2) = 73,5$$

Juga secara menyeluruh angka IPM sangat baik digunakan sebagai angka pembanding antar daerah, karena IPM dapat mengukur tingkat pencapaian upaya pembangunan manusia dari perspektif agregatif atau secara keseluruhan.

3.4. Kecepatan Pertumbuhan IPM (*Shortfall*)

Perbedaan perubahan kecepatan IPM dalam suatu periode untuk suatu wilayah dapat dilihat dari angka "*Shortfall*". Angka tersebut mengukur rasio pencapaian kesenjangan antara jarak yang "sudah ditempuh" dengan yang "belum ditempuh", untuk mencapai kondisi yang ideal (IPM = 100). Semakin tinggi angka *Shortfall*, semakin cepat kenaikan IPM.



Cara penghitungan reduksi *Shortfall* dinyatakan dengan

rumus:

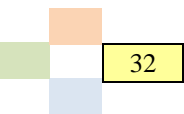
$$R = \left\{ \left[\frac{IPM_{(t1)} - IPM_{(t0)}}{IPM_{(ref)} - IPM_{(t0)}} \right] \times 100 \right\}^{1/n}$$

Dengan :

- R = Reduksi *Shortfall* per tahun;
- IPM_(t0) = IPM tahun awal;
- IPM_(t1) = IPM tahun terakhir; dan
- IPM_(ref) = IPM acuan atau ideal yang dalam hal ini sama dengan 100.

BAB IV. GAMBARAN UMUM



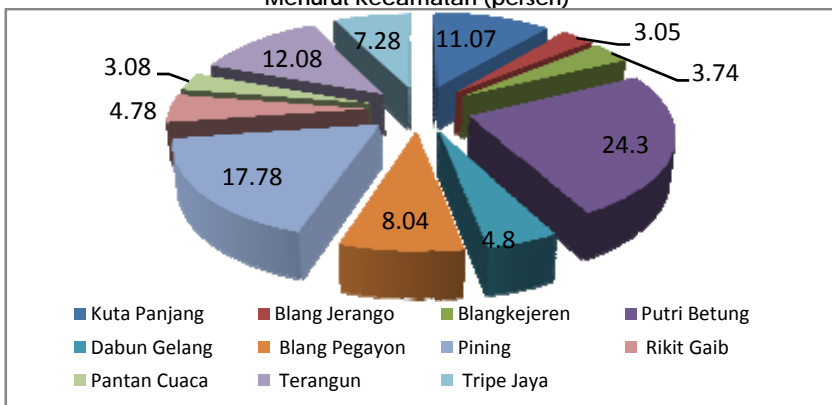


BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1. Gambaran Umum Wilayah

Letak geografis Kabupaten Gayo Lues berada pada posisi 03°40'-04°17' Lintang Utara/*North Latitude* dan 96°43'-97°55' Bujur Timur/*East Longitude*. Dengan luas daerah 5.719,67 km², Kabupaten Gayo Lues terbagi kedalam 11 wilayah kecamatan, 25 mukim, serta 144 desa/gampong. Kabupaten Gayo Lues memiliki batas wilayah administrasi yang meliputi sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Timur, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Aceh Barat Daya, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Langkat (Sumatera Utara), dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Gambar 4.1 Distribusi Luas Wilayah Kabupaten Gayo Lues Menurut Kecamatan (persen)



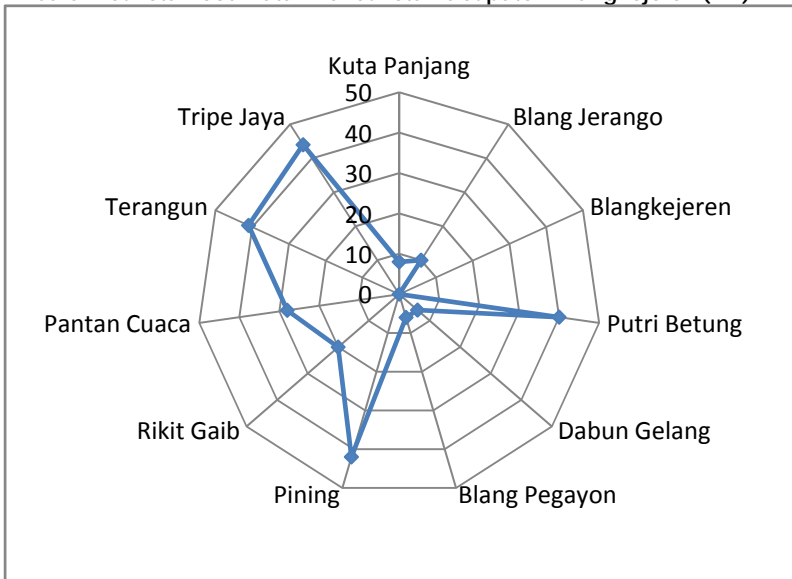
Luas wilayah masing-masing kecamatan sangat bervariasi, ada yang hanya sekitar 2 persen dari total wilayah kabupaten, akan tetapi ada pula satu kecamatan yang mencakup hampir 20 persen wilayah kabupaten itu. Kecamatan Putri Betung merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah sekitar 139.000 Ha atau 24,3 persen dari luas wilayah kabupaten. Kemudian Kecamatan Pining yang mempunyai wilayah seluas 101.660 Ha atau 17,78 persen dari luas kabupaten. Sementara itu Kecamatan Blangjerango mempunyai luas wilayah terkecil yaitu sekitar 17.448 atau 3,05 persen dari wilayah kabupaten. Sedangkan 8 kecamatan lainnya mempunyai luas wilayah berkisar antara 4 s/d 12 persen dari total wilayah kabupaten.

Kabupaten Gayo Lues yang semula merupakan bagian wilayah Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai potensi ekonomi dibidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Hal ini didukung oleh kondisi iklim wilayah yang memiliki iklim tropis dan tanah yang subur, sehingga sangat cocok sebagai wilayah budidaya berbagai macam komoditi pertanian terutama tanaman perkebunan dan kehutanan. Namun demikian, sebagai penyangga kawasan hutan lindung Leuser kabupaten ini harus sangat berhati-hati dalam memanfaatkan alam di wilayahnya.

Jarak tempuh masing-masing dari ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten relatif bervariasi, apalagi jika dilihat akses

dalam wilayah desa. Lima ibukota kecamatan mesti menempuh jarak sejauh 10 kilometer atau kurang. Sementara 6 kecamatan lainnya harus menempuh paling sedikit 20 kilometer untuk ke ibukota kabupaten, bahkan dari Rerebe (ibukota Kecamatan Tripe Jaya) mesti menempuh jarak sekitar 44 kilometer.

Gambar 4.2.
Jarak Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten: Blangkejeren (km)



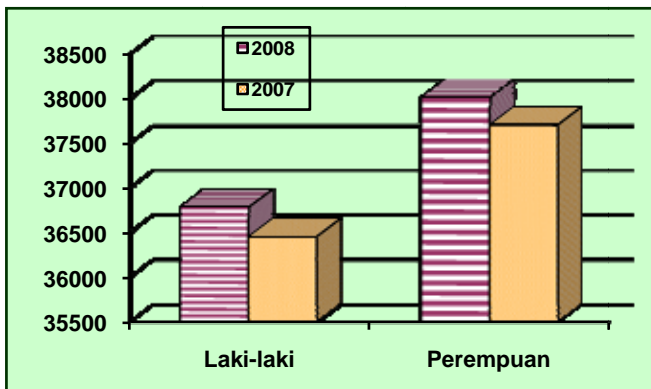
Sumber: BPS Gayo Lues, Gayo Lues Dalam Angka 2009

4.2. Gambaran Umum Kependudukan

Penduduk Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2008 berjumlah sekitar 74.794 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki lebih sedikit (36.783 jiwa) daripada perempuan.

Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Blangkejeren yang mencapai 100 orang per kilometer persegi. Sedangkan paling jarang penduduk yang mendiami Kecamatan Pining, yakni hanya empat orang per kilometer persegi.

Gambar 4.3.
Penduduk Kabupaten Gayo Lues Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2007-2008



Sumber: BPS Gayo Lues, Gayo Lues Dalam Angka 2009

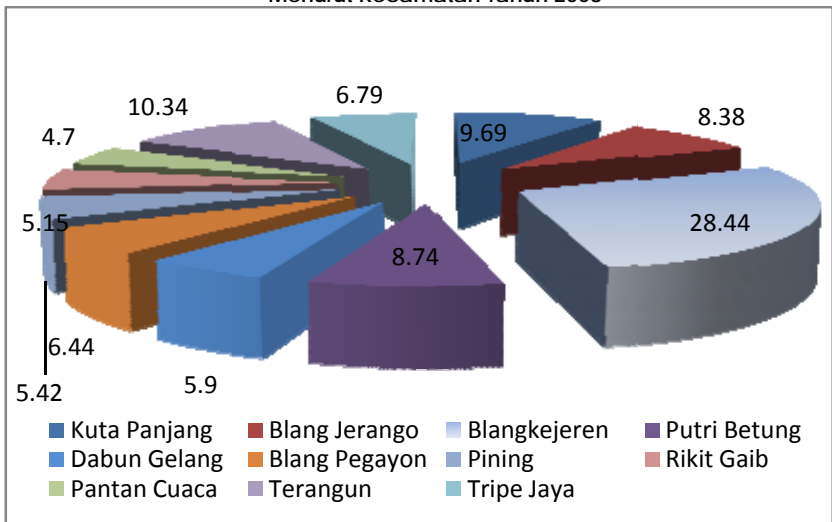
Dari Gambar 4.3. dapat juga dilihat komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, dimana penduduk laki-laki lebih sedikit daripada penduduk perempuan. Besarnya rasio/perbandingan jenis kelamin tahun 2008 adalah 96,77, berarti dari tiap 100 penduduk perempuan terdapat 96-97 laki-laki.

4.3. Penduduk Menurut Kecamatan

Secara administratif penduduk Kabupaten Gayo Lues mendiami 11 wilayah kecamatan. Masing-masing kecamatan

berpenduduk dengan jumlah yang bervariasi. Kecamatan Pantan Cuaca paling sedikit penduduknya, yakni 3.517 jiwa atau sekitar 4,70 persen dari keseluruhan penduduk tahun 2008. Sebaliknya Kecamatan Blangkejeren dihuni oleh 21.274 jiwa atau 28,44 persen dari total penduduk kabupaten ini.

Gambar 4.4.
Distribusi Penduduk Kabupaten Gayo Lues
Menurut Kecamatan Tahun 2008

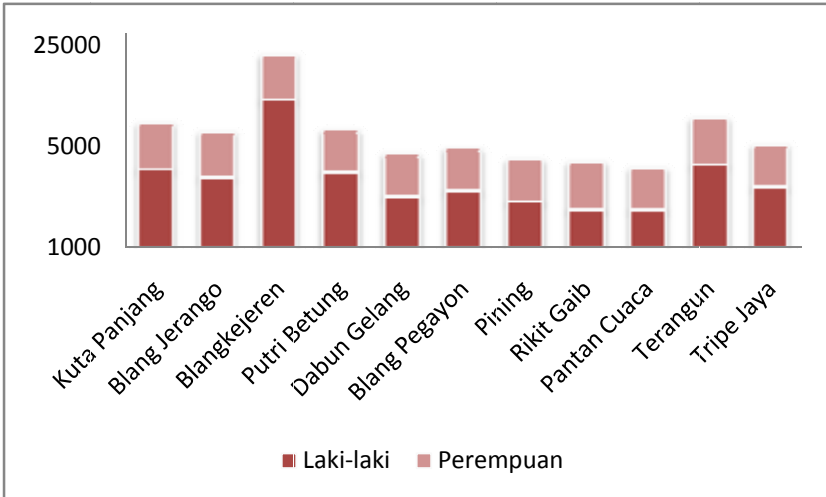


Sumber: BPS Gayo Lues, Gayo Lues Dalam Angka 2009

Jika diperhatikan lebih mendalam, proporsi penduduk laki-laki dan perempuan di setiap kecamatan cukup bervariasi. Lima kecamatan mempunyai jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit daripada penduduk perempuan dan hal sebaliknya terjadi pada 6 kecamatan lain. Dengan demikian, rasio jenis kelamin antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya

tampak bervariasi. Rasio jenis kelamin terbesar terdapat di Kecamatan Pantan Cuaca (105,55 persen) dan sebaliknya, rasio terkecil terjadi di Kecamatan Rikit Gaib (87,87 persen).

Gambar 4.5.
Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2008



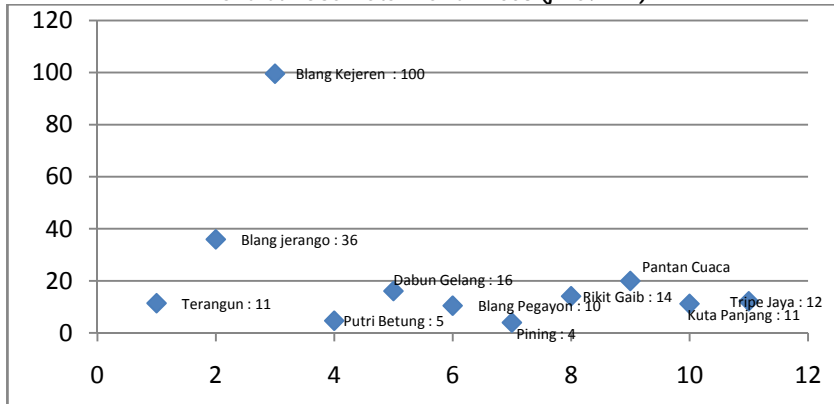
Sumber: BPS Gayo Lues, Gayo Lues Dalam Angka 2009

4.4. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan ukuran yang menggambarkan rata-rata jumlah penduduk pada setiap satu kilometer persegi luas wilayah. Rata-rata kepadatan penduduk di kabupaten ini hanya 13 orang per kilometer persegi. Kecamatan Blangkejeren merupakan kecamatan terpadat penduduknya dengan berpenghuni sekitar 100 orang per km², disusul Kecamatan Blangjerango (36 orang per km²). Sebaliknya, wilayah paling jarang adalah Kecamatan Pining

yang hanya didiami oleh 4 orang per km² dan Kecamatan Putri Betung yang didiami 5 orang per km². Angka ini pun jauh lebih rendah dibanding rata-rata kepadatan penduduk Provinsi NAD yang tercatat sekitar 67 jiwa/km².

Gambar 4.6.
Kepadatan Penduduk Kabupaten Gayo Lues
Menurut Kecamatan Tahun 2008 (jiwa/km²)



Sumber: BPS Gayo Lues, Gayo Lues Dalam Angka 2010

4.5. Potensi Sosial Ekonomi

4.5.1. Potensi Sosial

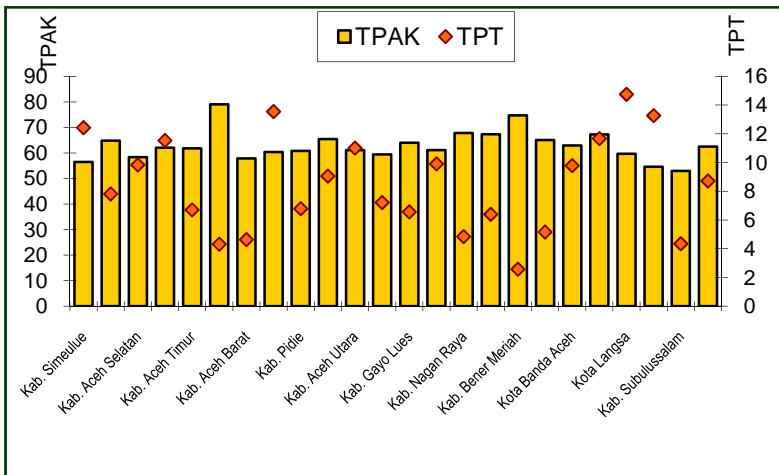
a. Ketenagakerjaan

Dari sekitar 75 ribu penduduk Kabupaten Gayo Lues (Sakernas 2009), sekitar 63,97 persen diantaranya merupakan angkatan kerja. Sebagian besar dari mereka telah bekerja (93,43 persen) dan sebagian kecil lainnya masih menganggur (6,57 persen). Angka 63,97 persen menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di kabupaten ini, dimana TPAK merupakan proporsi penduduk yang bekerja atau menganggur terhadap penduduk usia kerja (15 tahun keatas). Sementara

6,57 persen menggambarkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau proporsi penduduk yang menganggur terhadap angkatan kerja.

Dibandingkan dengan angka Provinsi NAD, TPAK Kabupaten Gayo Lues sedikit lebih tinggi. TPT Provinsi NAD secara umum lebih besar daripada angka serupa di kabupaten ini. Angka TPAK dan TPT Provinsi NAD masing-masing 62,50 persen dan 8,71 persen. Kedua indikator tersebut secara jelas menggambarkan bahwa peranserta penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi sedikit lebih tinggi daripada rata-rata daerah lainnya di Provinsi NAD. Hal ini juga diperkuat oleh rendahnya angka pengangguran terbuka yang lebih rendah dari rata-rata tingkat pengangguran provinsi.

Gambar 4.7.
 Persentase Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka Tahun 2009



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Agustus 2009

Jika dibandingkan dengan kabupaten lain, TPAK Gayo Lues berada di kelompok menengah. TPAK tertinggi adalah Kabupaten Aceh Tengah (79,04 persen) dan Kabupaten Bener Meriah (74,68 persen). Sedangkan TPAK terendah di Kota Subulussalam (52,97 persen).

Sementara itu TPT Gayo Lues berada pada kelompok menengah, dimana TPT tertinggi di Kota Langsa (14,74 persen) dan Kabupaten Aceh Besar (13,54 persen). Sebaliknya, TPT terendah di Kabupaten Bener Meriah (2,57 persen) dan Kabupaten Aceh Tengah (4,31 persen).

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam memacu gerak laju pembangunan. Manusia sebagai subjek pembangunan dengan tingkat pendidikan yang dimilikinya memegang peranan sangat penting. Seringkali tingkat pendidikan seseorang dijadikan dasar untuk menentukan kedudukan seseorang dalam bidang tugasnya.

Berdasarkan dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2009, diperoleh bahwa penduduk Kabupaten Gayo Lues usia 15 tahun keatas yang belum/tidak tidak tamat SD sebanyak 15,54 persen; tamat SD mencapai 35,04 persen; tamat SLTP mencapai 23,63 persen; tamat SLTA mencapai 18,50 persen; sedangkan yang menamatkan universitas mencapai 1,13 persen.

Jika dibandingkan dengan kondisi pendidikan penduduk Provinsi NAD, proporsi penduduk Gayo Lues yang

belum/tidak menamatkan sekolah dasar atau menamatkan sekolah dasar jauh lebih memprihatinkan. Namun pada kelompok penduduk yang telah menamatkan sekolah setingkat SLTP/ sederajat, SLTA/ sederajat, atau sekolah tinggi, kondisinya berbeda signifikan.

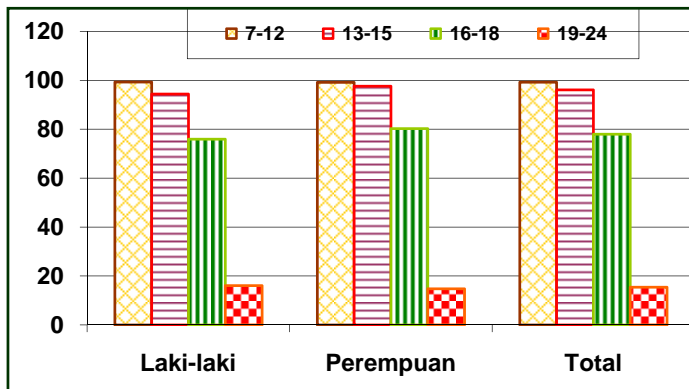
Penduduk Provinsi NAD secara umum mulai membaik dengan proporsi penduduk yang telah menamatkan sarjana mencapai 4,06 persen dari total penduduk usia 15 tahun keatas, di Kabupaten Gayo Lues baru mencapai 1,13 persen. Penduduk NAD yang telah menamatkan diploma mencapai 3,31 persen, sementara di Gayo Lues mencapai 3,82 persen. Proporsi penduduk yang menamatkan SLTA di Gayo Lues mencapai 18,50 persen, sedangkan di NAD secara keseluruhan hanya 27,84 persen.

Komposisi jumlah penduduk menurut usia sekolah di Kabupaten Gayo Lues tahun 2009 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana angka partisipasi sekolah semakin menurun seiring dengan naiknya tingkat kelompok umur. Tercatat APS usia 7-12 tahun sebesar 99,26 persen, usia 13-15 tahun 96,14 persen, dan usia 16-18 tahun sebesar 78,00 persen. Lebih memprihatinkan lagi pada penduduk usia 19-24 tahun, hanya 15,42 persen diantara mereka yang masih bersekolah.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, terlihat bahwa tingkat partisipasi sekolah penduduk perempuan lebih tinggi daripada laki-laki untuk usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Pada kelompok umur 7-12 tahun dan 19-24 tahun, tidak berbeda nyata antara

laki-laki dan perempuan. Kenyataan ini menunjukkan bukti bahwa perempuan kian maju dan berusaha mensejajarkan diri dengan mitranya kaum laki-laki.

Gambar 4.8.
Tingkat Partisipasi Sekolah Penduduk Usia Sekolah
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009 (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2009

4.5.2. Potensi Ekonomi

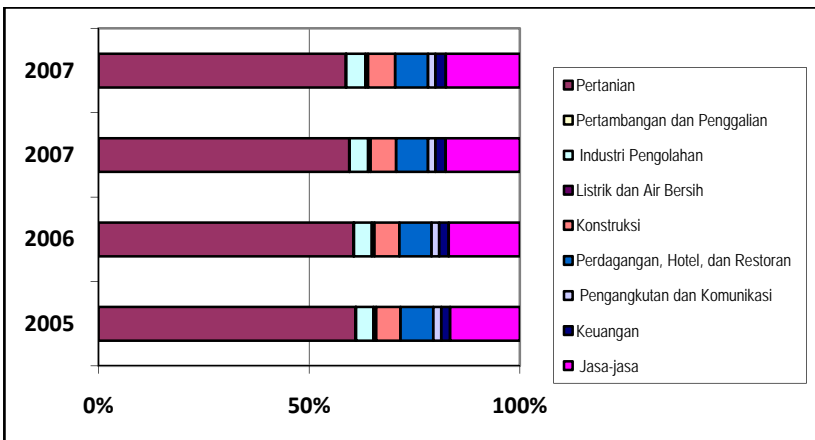
Sampai saat ini perekonomian Kabupaten Gayo Lues masih ditopang oleh sektor pertanian. Sejak daerah ini masih tergabung dengan Kabupaten Aceh Tenggara, sektor pertanian menyumbang lebih dari separuh PDRB, meskipun pertanian cenderung yang menurun selama beberapa periode terakhir. Pada tahun 2005 kontribusi yang diberikan oleh sektor pertanian terhadap pembentukan nilai PDRB tercatat sebesar 61,05 persen. Angka ini berangsur menurun perlahan menjadi 58,73 persen pada tahun 2008. Sementara itu

kontribusi yang diberikan oleh sektor bangunan meningkat dari 5,78 persen pada tahun 2005 menjadi 6,45 persen tahun 2008.

Sektor pertanian terutama disokong oleh subsektor tanaman bahan makanan (26,61 persen) dan tanaman perkebunan (15,79 persen). Subsektor peternakan dan hasil-hasilnya juga memberikan kontribusi yang tidak kecil, yakni sebesar 7,31 persen. Subsektor kehutanan memberikan kontribusi sebesar 6,22 persen.

Sektor lain yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap kinerja perekonomian daerah ini adalah sector jasa-jasa, yaitu sebesar 17,59 persen. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberikan sumbangan cukup besar, yaitu sebesar 7,79 persen. Sedangkan 6,45 persen lainnya diberikan sector konstruksi.

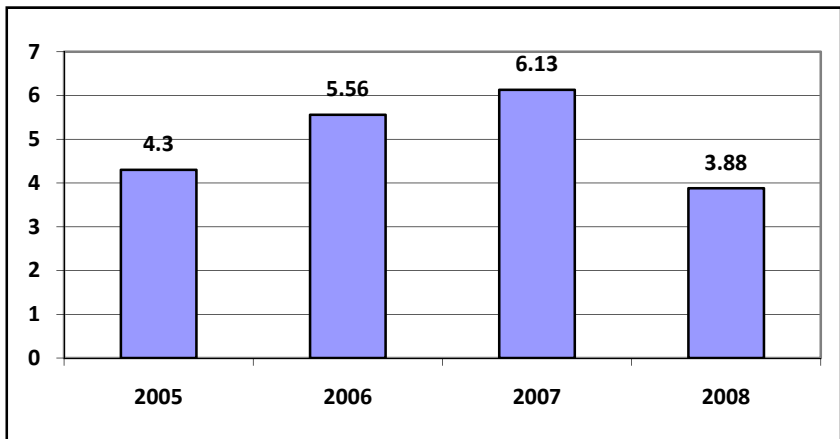
Gambar 4.9.
Peranan Sektor Ekonomi dalam Pembentukan PDRB
Kabupaten Gayo Lues Tahun 2005–2008 (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB Kabupaten Gayo Lues 2009

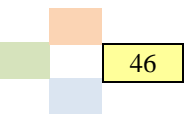
Perekonomian di Kabupaten Gayo Lues pada periode 2005-2008 perkembangannya cukup baik, namun pada tahun 2008 cenderung melambat. Pertumbuhan ekonomi terbaik pada tahun 2007 yang mencapai 6,13 persen.

Gambar 4.10
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gayo Lues
Tahun 2002 – 2008 (Persen)



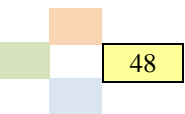
Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB Kabupaten Gayo Lues 2009

Jika dihubungkan antara PDRB dengan tenaga kerja di kabupaten ini, terdapat keterkaitan yang nyata. Sektor pertanian yang menguasai perekonomian daerah memang benar-benar menjadi tumpuan utama pencaharian masyarakat, yakni 64,24 persen dari sekitar 30 ribu penduduk yang bekerja. Sektor jasa-jasa atau tersier sudah menguasai sekitar 33,83 persen dari total tenaga kerja dan sektor sekunder menjadi pencaharian sekitar 1,93 persen penduduk.



BAB V. IPM KABUPATEN GAYO LUES





BAB V

IPM KABUPATEN GAYO LUES

5.1. Komponen Penghitungan IPM

5.1. 1. Angka Harapan Hidup

Komponen angka harapan hidup diharapkan mampu menggambarkan keadaan lama hidup sekaligus hidup sehat dari masyarakat. Angka harapan hidup yang tinggi dianggap mencerminkan kesejahteraan penduduk yang tinggi pula. Hal ini disebabkan karena harapan hidup merupakan resultan dari berbagai faktor lain dari derajat sosial ekonomi penduduk.

Secara empiris terlihat bahwa pada masyarakat yang tingkat ekonominya baik terdapat kecenderungan harapan hidupnya tinggi. Karena pada masyarakat yang demikian, akses dari pelayanan terhadap kesehatan lebih memadai dibanding bila kondisi ekonominya tidak baik.

Hubungan positif juga ditunjukkan oleh tingkat pendidikan dimana semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, berarti semakin tinggi pula kesadaran mereka akan pentingnya hidup sehat, dan pada akhirnya akan memperpanjang usia harapan hidup mereka. Upaya mendidik kaum perempuan terbukti sebagai kunci untuk menghancurkan lingkaran setan kesehatan anak yang buruk, kinerja pendidikan yang rendah, pendapatan yang minim, serta tingkat fertilitas yang tinggi (Todaro, 2000).

Selama periode 2008-2009 angka harapan hidup penduduk Kabupaten Gayo Lues mengalami kenaikan dari 66,84 tahun menjadi 66,96 tahun. Angka 66,96 menunjukkan bahwa seseorang yang lahir pada 2009 mempunyai peluang rata-rata kelangsungan hidupnya hingga 66,96 tahun ke depan atau sekitar 67 tahun. Berarti kualitas hidupnya meningkat, sebagai akibat dari hal-hal seperti pemenuhan makanan lebih baik, kesehatan terjaga, dan sebagainya sehingga mengakibatkan lama hidupnya bertambah.

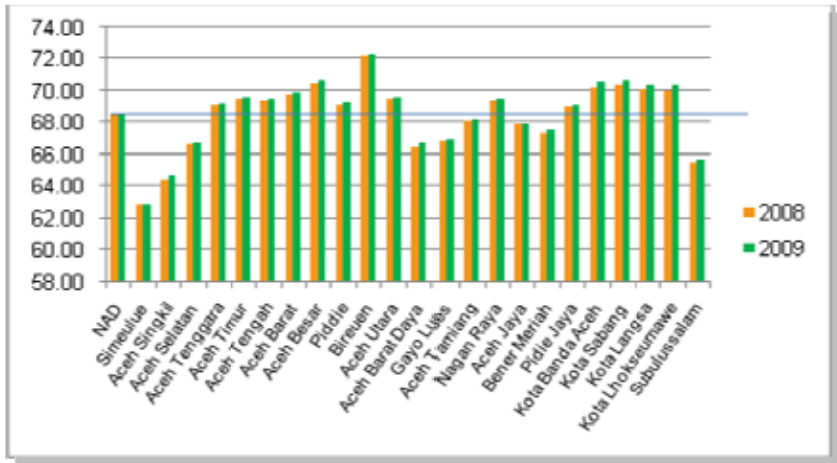
Dibandingkan dengan daerah kabupaten/kota lainnya, Gayo Lues berada di bagian menengah bawah karena angka harapan hidup terendah pada tahun 2009 adalah 62,91 tahun untuk Kabupaten Simeulue. Sebaliknya, angka harapan hidup tertinggi adalah penduduk Kabupaten Bireuen yang mencapai 72,32 tahun disusul Kota Sabang (70,69 tahun).

Jika dibandingkan dengan angka harapan hidup Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ternyata harapan hidup penduduk Kabupaten Gayo Lues masih lebih rendah. Angka harapan hidup Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tercatat 68,60 tahun pada 2009. Sementara itu angka harapan hidup penduduk Indonesia secara umum juga masih lebih tinggi yaitu 70,60 tahun.

Gambaran tersebut mengindikasikan bahwa kondisi kesehatan penduduk Kabupaten Gayo Lues masih dibawah rata-rata daripada kondisi penduduk di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam secara umum. Demikian pula masih rendah

daripada kondisi penduduk Indonesia secara keseluruhan. Karena gizi, kesehatan, pendidikan, keterampilan dan pengetahuan merupakan faktor yang menentukan kualitas sumberdaya manusia maka pembangunan faktor-faktor tersebut harus dilakukan. Hal ini disebut sebagai pembentukan modal insani, yaitu proses peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seluruh penduduk negara (Jhingan, 1983).

Gambar 5.1. Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi NAD Tahun 2008-2009

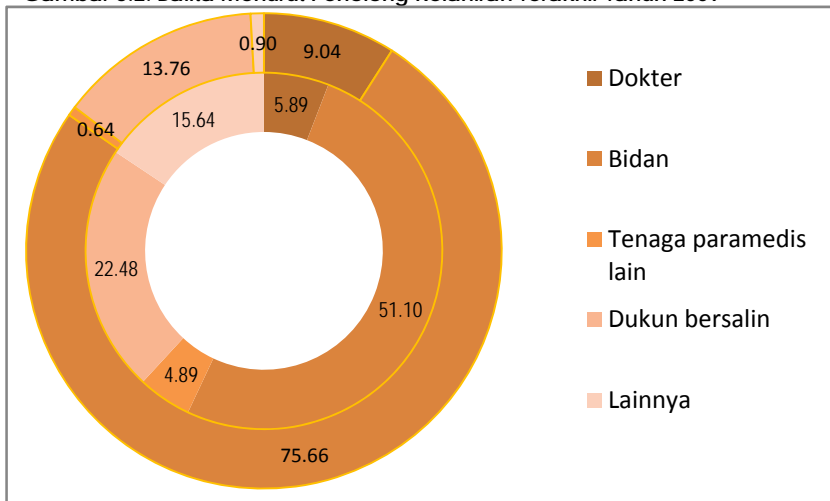


Sumber: Badan Pusat Statistik

Diyakini bahwa terdapat kaitan yang erat antara angka harapan hidup dan angka kematian bayi. Semakin tinggi angka kematian bayi berarti akan semakin rendah usia harapan hidup. Sebaliknya semakin rendah angka

kematian bayi maka semakin tinggi usia harapan hidup. Hal ini disebabkan karena angka kematian bayi sangat mencerminkan pola kematian penduduk secara umum. Secara jelas Todaro (2002) menyebutkan bahwa angka fertilitas yang tinggi cenderung merugikan kesehatan ibu dan anak-anaknya yang pada akhirnya memperbesar kematian bayi dan anak.

Gambar 5.2. Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir Tahun 2009

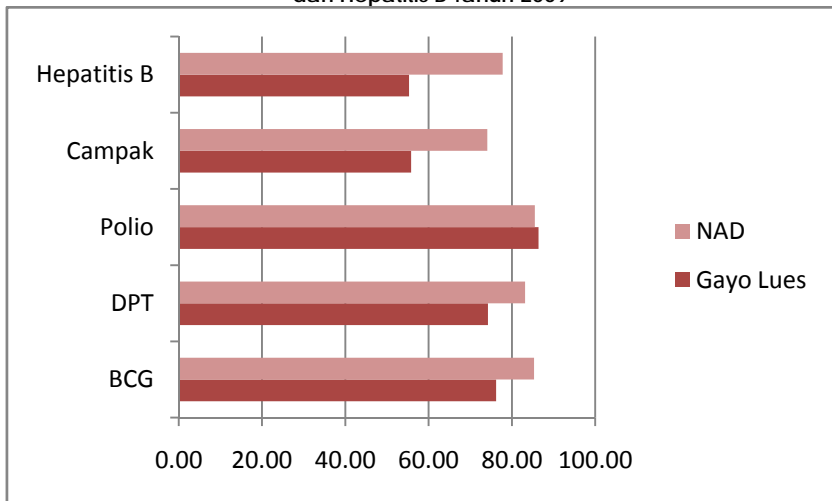


Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2009

Kematian ibu dan bayi sangat tergantung pada kondisi kesehatan ibu dan bayi. Kesehatan ibu dan bayi terutama saat melahirkan akan lebih terjaga jika ditolong oleh tenaga profesional dalam hal ini dokter atau bidan. Meskipun tenaga dukun bayi sangat membantu masyarakat, namun

pengetahuan dan keterampilan dukun harus ditingkatkan. Keberadaan dukun bayi masih diandalkan masyarakat mengingat keterbatasan tenaga medis terutama bagi daerah-daerah terpencil. Seperti di daerah lainnya, penolong kelahiran di Gayo Lues (tahun 2009) mayoritas dilakukan oleh bidan (51,10 persen). Angka tersebut lebih rendah daripada rata-rata angka provinsi yang mencapai 75,66 persen. Hal ini menunjukkan pembenahan fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Gayo Lues harus lebih ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari wilayah lain.

Gambar 5.3.
Cakupan Imunisasi BCG, DPT, Polio, Campak, dan Hepatitis B Tahun 2009



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2009

Beberapa penyakit yang seringkali menyerang bayi dapat menyebabkan kecacatan atau bahkan kematian

jika tidak ditangani dengan baik. Oleh sebab itu peranan imunisasi sangat bermanfaat bagi bayi untuk kehidupan saat ini dan masa yang akan datang. Imunisasi polio, hepatitis B, BCG, DPT, dan campak merupakan jenis yang lazim dilakukan untuk bayi di puskesmas-puskesmas atau sarana kesehatan lainnya. Terlihat pada Gambar 5.3 bahwa dari 5 jenis imunisasi tersebut, prevalensi imunisasi di Kabupaten Gayo Lues masih lebih rendah daripada Provinsi NAD secara keseluruhan, kecuali prevalensi imunisasi polio. Jika rata-rata prevalensi imunisasi polio NAD 85,50 persen, maka prevalensi Gayo Lues untuk jenis yang sama telah mencapai 86,40 persen.

5.1.2. Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Bersekolah

Kedua indikator ini diharapkan mampu mencerminkan tingkat pengetahuan dan keterampilan penduduk. Angka melek huruf untuk keperluan ini adalah angka melek huruf penduduk 15 tahun keatas sehingga diharapkan tidak terjadi bias oleh penduduk usia anak-anak. Kemampuan baca tulis dan menyerap informasi sangat penting, karena literasi merupakan komponen dasar pengembangan manusia (Todaro, 1997).

Rata-rata lama bersekolah mencerminkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan atau sedang dijalani oleh penduduk usia 25 tahun keatas. Pada usia ini dianggap

penduduk sudah menyelesaikan seluruh pendidikannya sehingga tidak ada bias akibat penduduk muda.

Kemampuan baca tulis penduduk di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2009 secara umum sudah baik, yaitu mencapai 96,39 persen. Angka itu lebih tinggi dari literasi Indonesia secara umum. Sedangkan 3,61 persen penduduk provinsi di ujung Sumatera ini masih buta huruf dan kemungkinan besar adalah penduduk usia lanjut atau penduduk yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali.

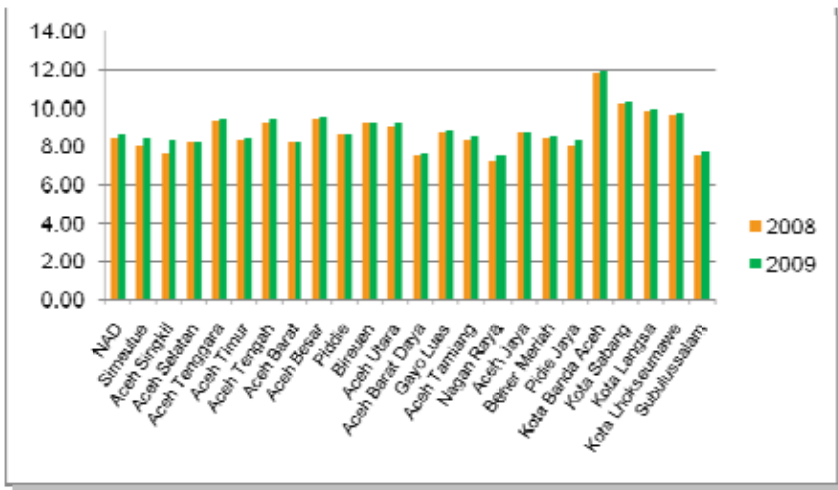
Sementara itu angka literasi penduduk Kabupaten Gayo Lues sebesar 86,97 persen, merupakan yang paling rendah daripada kabupaten/kota lain di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan lebih rendah daripada angka nasional. Ini menunjukkan bahwa komponen kualitas sumberdaya manusia khususnya dilihat dari angka melek huruf paling buruk di Nanggroe Aceh Darussalam dan harus ditingkatkan.

Lain halnya dengan rata-rata lama bersekolah, salah satu komponen pembangunan manusia bidang pendidikan ini lebih baik daripada rata-rata angka Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pada tahun 2008 dan 2009 penduduk Kabupaten Gayo Lues menghabiskan waktunya untuk bersekolah sekitar 8,70 dan 8,71 tahun. Sementara rata-rata lama sekolah Provinsi NAD mencapai 8,50-8,63 tahun pada 2008-2009. Sedangkan rata-rata lama sekolah nasional lebih rendah (7,52 tahun dan 7,72 tahun). Waktu 8,71 tahun bersekolah berarti rata-rata penduduk belum menamatkan pendidikan 9 tahun atau tamat

SLTP, jadi mereka hanya sempat menamatkan setara kelas 2 SLTP.

Selain komponen-komponen yang langsung terlibat dalam penghitungan angka IPM, juga perlu diperhatikan indikator-indikator pendukung lainnya yang juga secara langsung ataupun tidak langsung turut berpengaruh dalam pembentukan angka indeks dari komponen langsung IPM. Karena dari indikator-indikator itu dapat pula terbaca gambaran sisi lain keadaan sosial dari aktivitas masyarakat suatu wilayah.

Gambar 5.4.
Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di NAD Tahun 2008-2009



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan kemampuan dan kepribadian anak didik. Dalam periode

tinggal landas, pendidikan diamati sebagai suatu gejala jangka panjang. Pengertian pendidikan dalam jangka panjang ini dapat dipahami sebagai suatu proses pendidikan yang mempunyai kaitan erat dengan ketenagakerjaan khususnya dan pembangunan ekonomi pada umumnya.

Dipandang dari sudut waktu, pendidikan mempunyai jangkauan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Perbedaan pandangan dari dimensi waktu itu akan mempengaruhi atau mengubah skala atau dimensi ruang dari pendidikan. Dari dimensi ruang, pendidikan dipandang sebagai suatu sistem yaitu sistem pendidikan. Perubahan dimensi ruang ini akan menggeser inti permasalahan pendidikan yang dihadapi. Pergeseran inti permasalahan itu pada gilirannya akan mempengaruhi usaha pemecahan permasalahannya.

Pendidikan dalam jangka pendek (kurang dari satu tahun atau dari hari ke hari), mencakup bagaimana permasalahan memperlancar proses belajar dan mengajar di dalam kelas. Pendidikan dalam jangka panjang (lebih dari dua puluh lima tahun), merupakan gejala kebudayaan dan permasalahannya terpusat pada bagaimana mentransformasikan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan dalam jangka menengah (sekitar lima atau sepuluh tahun), merupakan gejala ekonomi yaitu bagaimana menyiapkan lulusan atau putus pendidikan untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja.

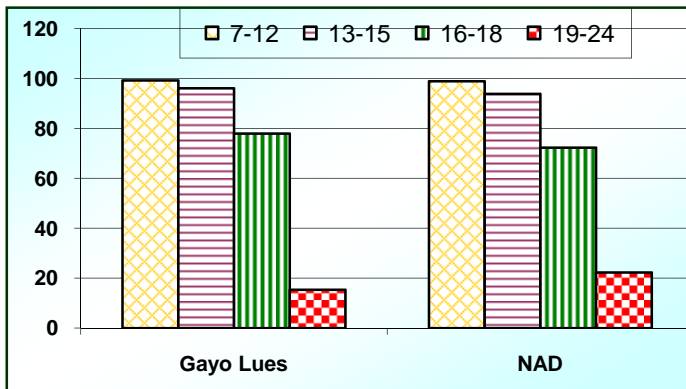
Output dari subsistem pendidikan yang berupa lulusan atau putus sekolah ini merupakan input kepada subsistem ketenagakerjaan. Di dalam subsistem ketenagakerjaan ini lulusan dikenal sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja ini merupakan input yang diproses dalam lapangan kerja. Output dari proses yang berlangsung dalam lapangan kerja ini berupa produktivitas tenaga kerja. Dengan perkataan lain, permasalahan yang dihadapi dalam subsistem ketenagakerjaan tersebut adalah bagaimana meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Dengan kata lain, proses pendidikan apabila dilihat pada satu titik waktu mencakup tiga proses yang berjalan secara bersamaan yaitu berkaitan dengan proses belajar mengajar dalam lembaga pendidikan, berkaitan dengan penyiapan tenaga kerja, serta berkaitan dengan penerusan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam suatu sistem pembangunan nasional, peningkatan mutu sumberdaya manusia dapat dilihat sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui suatu proses yang berlangsung di dalam subsistem pendidikan, subsistem ketenagakerjaan, dan subsistem ekonomi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 menegaskan bahwa (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu, (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual,

dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus, (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus, (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus, (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Gambar 5.5.
 APS Kabupaten Gayo Lues dan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
 Tahun 2009



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2009

Dari ketentuan di atas maka setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan bahkan bagi masyarakat terpencil dan terbelakang sekalipun. Jadi dengan diwajibkannya pendidikan dasar 9 tahun, semestinya tidak

terdengar lagi adanya anak putus sekolah akibat ketiadaan biaya atau ketiadaan akses terhadap sarana pendidikan. Namun, jika dilihat dalam angka partisipasi sekolah kasar seperti pada Tabel 4.7. terlihat bahwa partisipasi sekolah penduduk belum mencapai 100 persen, apalagi untuk mereka yang berusia 16-18 tahun.

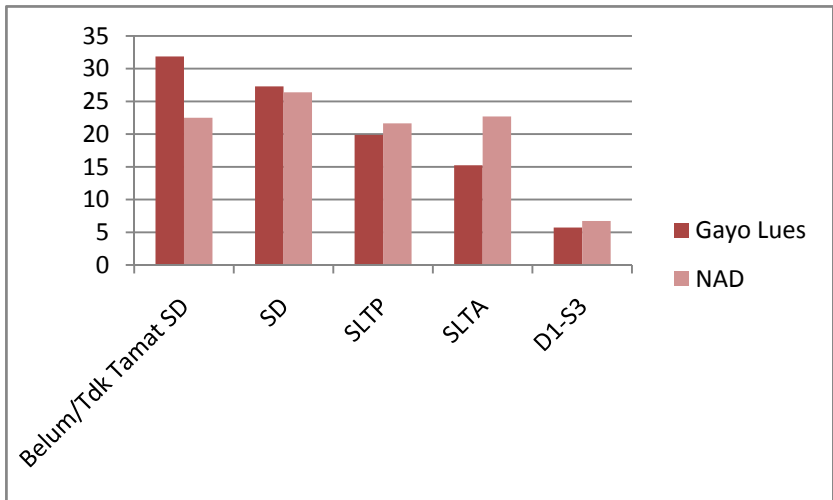
Secara umum APS Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan juga Kabupaten Gayo Lues tidak jauh berbeda pada tahun 2009. Namun terlihat ada kesenjangan pada kelompok usia kelompok usia 19-24 tahun (sekolah tinggi), walaupun pada kelompok usia pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SLTP), APS di Gayo Lues cenderung lebih tinggi.

Keadaan ini cukup memberikan informasi bagi kita, bahwa bekal pendidikan bagi generasi muda di daerah ini masih kurang maksimal, karena pendidikan dasar sebagai modal hidup kurang memadai. Hal ini dapat dikarenakan oleh rendahnya minat orangtua atau anak dalam melanjutkan pendidikan, karena keterbatasan ekonomi keluarga, atau mungkin karena sarana dan prasarana pendidikan yang sangat terbatas. Oleh sebab itu, dengan mengamati angka-angka tersebut, hendaknya pembangunan pendidikan harus lebih diperhatikan. Karena dari hal itu berarti ada hal yang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan pada program pendidikan

anak yang dapat mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia daerah di masa mendatang.

Indikator lain yang erat kaitannya dengan kualitas pendidikan penduduk adalah tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Jika dilihat dari proporsi mereka yang tidak atau belum pernah sekolah, semakin kecil proporsinya berarti semakin baik, sebaliknya bila proporsinya semakin besar berarti proses pencerdasan bangsa tidak mencapai sasaran. Disisi lain, jika proporsi yang menamatkan pendidikan tinggi semakin besar maka kualitas sumberdaya manusianya semakin baik.

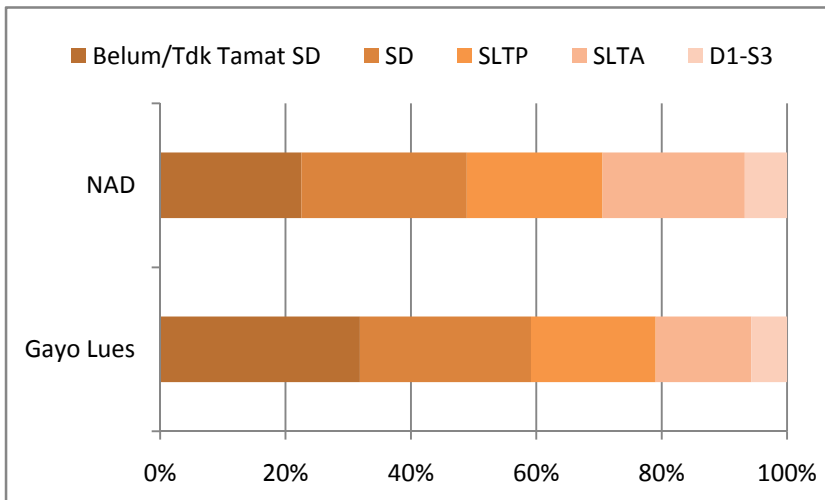
Gambar 5.6.
Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2009



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2009

Tiga puluh persen lebih penduduk usia 10 tahun keatas di Kabupaten Gayo Lues belum atau tidak tamat sekolah dasar. Angka ini sedikit lebih besar dari proporsi angka provinsi secara umum yang tercatat lebih dari 20 persen. Proporsi penduduk yang menamatkan sekolah dasar sama dengan angka provinsi secara umum. Sebaliknya, untuk yang menamatkan pendidikan SLTP, SLTA, dan pendidikan tinggi, angkanya lebih rendah. Sehingga dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Gayo Lues lebih rendah dari kualitas pendidikan provinsi umumnya dan ini berakibat pada kualitas sumberdaya manusianya.

Gambar 5.7.
Proporsi Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2009



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2009

Gambar 5.7 dapat dilihat bahwa proporsi terbesar penduduk Gayo Lues tahun 2009 usia 10 tahun ke atas adalah mereka yang hanya menamatkan pendidikan tingkat sekolah menengah pertama ke bawah, baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Secara keseluruhan baik laki-laki maupun perempuan, tahun 2009 penduduk Gayo Lues umur 10 tahun keatas dengan tingkat pendidikan SLTP ke bawah sebanyak 79 persen lebih, sisanya adalah penduduk dengan tingkat pendidikan tamatan SLTA ke atas. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi NAD yang mencatat angka 70,56 persen penduduk dengan tingkat pendidikan SLTP kebawah.

5.1.3. Daya Beli

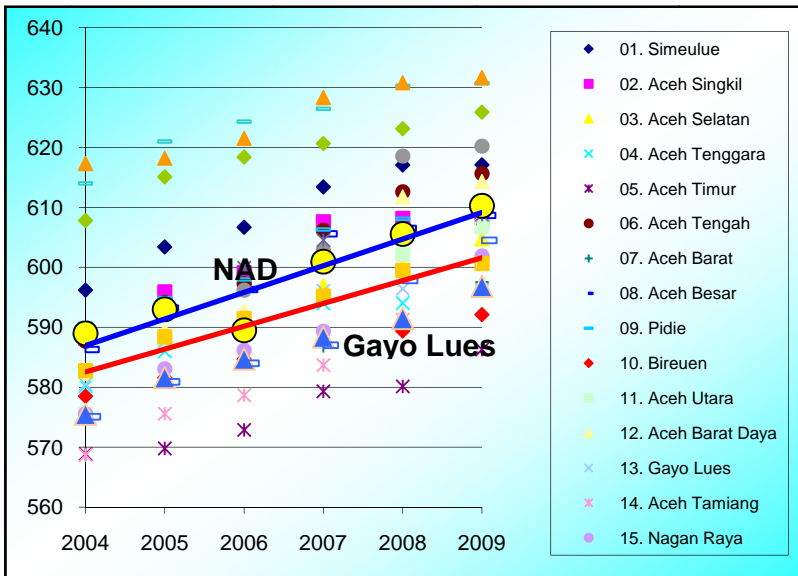
Kemampuan daya beli masyarakat diharapkan dapat terwakili oleh variabel konsumsi riil per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran per kapita setahun yang sudah distandarkan dengan mendeflasikan dengan Indeks Harga Konsumen. Selanjutnya variabel ini disesuaikan dengan menggunakan Formula Atkinson.

Secara umum kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Gayo Lues maupun di seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengalami peningkatan. Dapat dilihat pada Gambar 5.8 bahwa kecenderungan peningkatan daya beli penduduk di

Kabupaten Gayo Lues lebih rendah daripada kecenderungan daya beli rata-rata penduduk di Provinsi NAD.

Pada tahun 2008, daya beli terendah Rp 580.157 di Aceh Timur hingga tertinggi sebesar Rp 630.769 di Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2009 konsumsi per kapita berkisar antara Rp 586.294 di Kabupaten Aceh Timur sampai dengan Rp 631.630 di Kota Lhokseumawe. Di Gayo Lues sendiri tercatat Rp 596.443 pada tahun 2008 dan meningkat menjadi Rp 600.155 pada tahun 2009.

Gambar 5.8.
Pengeluaran Riil Per Kapita Disesuaikan
Tahun 2004-2009 (Rp ribu)



Sumber: Badan Pusat Statistik

5.2. IPM Kabupaten Gayo Lues

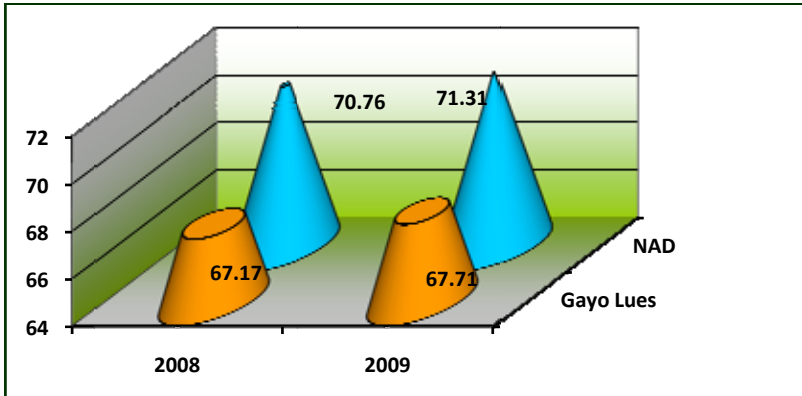
5.2.1. IPM Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008-2009

Pada tahun 2008 IPM Kabupaten Gayo Lues sebesar 67,17 dan setahun kemudian meningkat menjadi 67,59. Angka tersebut merupakan yang terendah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan lebih rendah daripada IPM nasional. Pada tahun 2009 IPM provinsi sebesar 71,31 sedangkan nasional mencapai 71,76.

Rendahnya IPM Kabupaten gayo Lues dapat terlihat dari komponen penyusunnya, misalnya dari sisi pendidikan, angka melek huruf di kabupaten ini hanya 86,97 persen, paling rendah di provinsi ini dan jauh lebih rendah dari rata-rata angka provinsi (96,39 persen). Namun demikian, dalam hal rata-rata lama sekolah, penduduk di Kabupaten Gayo Lues lebih lama dalam mengenyam pendidikan yaitu hanya 8,71 tahun. Sedangkan penduduk Provinsi NAD secara umum menduduki bangku sekolah rata-rata selama 8,63 tahun. Artinya, dibandingkan daerah lain kesadaran pendidikan penduduk Gayo Lues masih rendah, akan tetapi kualitas penduduk yang berpendidikan lebih baik.

Sementara itu untuk komponen pengeluaran per kapita ril (yang disesuaikan) lebih rendah dari pengeluaran rata-rata provinsi maupun angka nasional. Pada tahun 2009 pengeluaran per kapita ril di Kabupaten Gayo Lues tercatat Rp 600.155, pengeluaran per kapita provinsi mencapai Rp 610.268.

Gambar 5.9.
Perkembangan IPM Kabupaten Gayo Lues dan NAD
Tahun 2008-2009



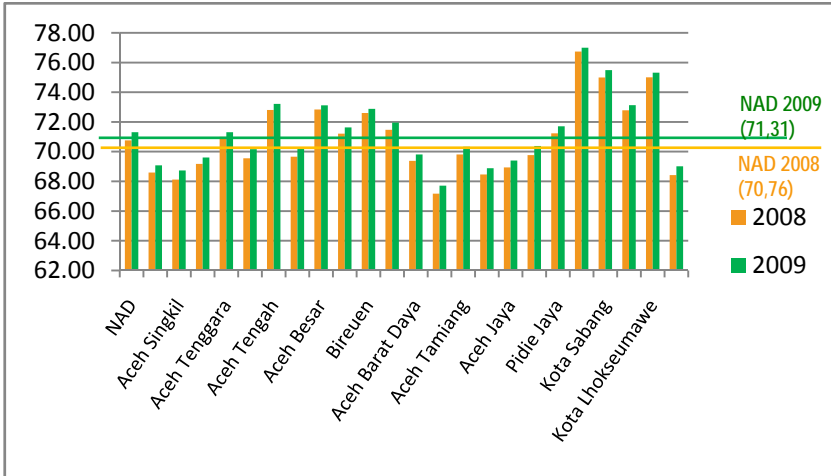
Sumber: Badan Pusat Statistik

Selama 2008-2009 IPM maupun komponen di dalamnya mengalami perubahan-perubahan, secara agregat perubahan IPM itu biasa disebut reduksi *shortfall*. Pada periode tersebut perubahannya lebih rendah daripada kenaikan rata-rata provinsi secara umum ataupun nasional. Pada periode tersebut reduksi *shortfall* IPM Kabupaten Gayo Lues (1,28) lebih rendah daripada reduksi *shortfall* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (1,90) maupun nasional (2,06). Hal ini mengindikasikan bahwa kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Gayo Lues lebih lambat daripada di Provinsi NAD maupun Indonesia umumnya.

5.2.2. Perbandingan IPM Antarkabupaten/kota

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, posisi IPM Kabupaten Gayo Lues tahun 2008-2009 merupakan yang terendah atau berada pada peringkat terakhir dari 23 daerah. Dua daerah yang terbawah adalah Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Singkil dengan nilai IPM masing-masing sebesar 67,59 dan 68,29 pada tahun 2009. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sendiri mempunyai capaian IPM sebesar 71,31 pada tahun yang sama. IPM kedua kabupaten tersebut berada pada posisi yang sama untuk tahun 2008.

Gambar 5.10.
Posisi IPM Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan IPM NAD,
Tahun 2008-2009

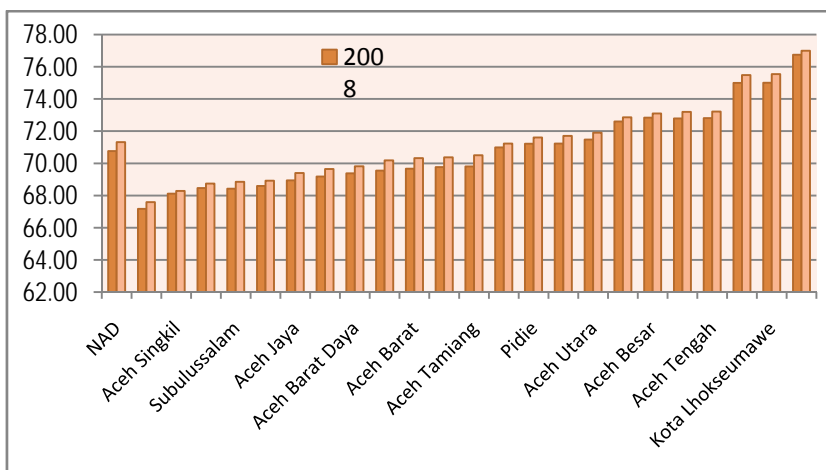


Sumber: Badan Pusat Statistik

Nilai IPM tertinggi diperoleh Kota Banda Aceh untuk periode yang sama, yaitu 76,74 pada tahun 2008 dan 77,00 pada tahun berikutnya. Untuk tahun 2009, empat posisi terbaik berikutnya adalah Kota Lhokseumawe (75,54), Kota Sabang (75,49), Kabupaten Aceh Tengah (73,22), dan Kota Langsa (73,20). Daerah lain yang mempunyai IPM di atas IPM provinsi (71,31) adalah Kabupaten Aceh Besar (73,10), Bireuen (72,86), Aceh Utara (71,90), Pidie Jaya (71,71), dan Kabupaten Pidie (71,60), mempunyai capaian yang sama dengan IPM Provinsi.

Pada periode 2008-2009 IPM Kabupaten Gayo Lues bergeser naik dengan nilai reduksi *shortfall* lebih tinggi daripada beberapa kabupaten/kota lain. Walaupun demikian, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, peringkatnya masih pada posisi terakhir dari seluruh 23 kabupaten/kota.

Gambar 5.11.
Urutan IPM Kabupaten/Kota Se-Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008-2009



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dibandingkan dengan kabupaten induknya Aceh Tenggara, ternyata Gayo Lues mempunyai kualitas sumberdaya manusia yang cukup berbeda. IPM kedua daerah yang dimekarkan dan daerah hasil pemekaran tersebut masing-masing 71,23 dan 67,59 dengan peringkat masing-masing pada posisi 11 dan 23.

Tiga daerah dengan IPM terbawah adalah Kabupaten Gayo Lues (67,59), Aceh Singkil (68,29), dan Kabupaten Nagan Raya (68,74). Sebaliknya, pencapaian IPM tertinggi masih diduduki oleh Kota Banda Aceh (77,00) dan Kota Lhokseumawe (75,54). Urutan berikutnya adalah Kota Sabang (75,49), Kabupaten Aceh Tengah (73,22), dan Kota Langsa (73,20).

Jika perhatikan perubahan reduksi *shortfall* masing-masing daerah, ternyata Kabupaten Aceh Tamiang adalah yang tertinggi yaitu mencapai 2,31. Sebaliknya, Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Aceh Tenggara, merupakan yang terendah yakni masing-masing tercatat 0,52 dan 0,81. Sementara Kabupaten Gayo Lues sebesar 1,28 masih dibawah angka provinsi (1,90).



Secara garis besar, daerah kabupaten/kota tersebut dapat dikelompokkan menjadi kategori IPM tinggi dan rendah, dimana katagori tinggi jika IPM kabupaten/kota sama dengan atau lebih tinggi dari IPM provinsi. Dengan mengambil IPM Provinsi sebagai patokan, pengelompokan tersebut menjadi seperti terlihat pada Tabel 13.

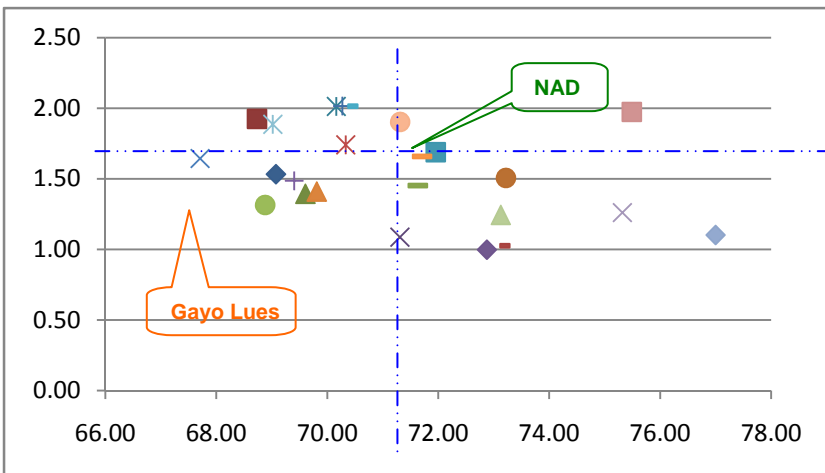
Kabupaten/Kota yang termasuk dalam kelompok tinggi adalah Banda Aceh, Lhokseumawe, Sabang, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Besar, Pidie, Langsa, Bireuen, dan Pidie Jaya. Sementara daerah lain yang termasuk dalam kawasan barat-tengah (kecuali Aceh Timur dan Aceh Tamiang) mempunyai IPM dalam kelompok rendah. Demikian pula Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga dalam katagori rendah jika dibandingkan dengan angka IPM nasional. Nilai IPM atau perubahan (2008-2009) dikatakan **tinggi** bila besarnya **sama dengan** atau **lebih tinggi** dari provinsi.

Bila pengamatan juga melibatkan variabel besarnya perubahan IPM, maka akan dapat dibuat suatu pengelompokan berdasarkan nilai IPM dan perubahannya (*shortfall*). Nilai yang dijadikan acuan adalah nilai IPM provinsi. Dengan membagi daerah plot menjadi empat kuadran, maka tiap-tiap kuadran dikatagorikan sebagai:

- ❖ Kuadran I : Nilai IPM tinggi, perubahan tinggi
- ❖ Kuadran II : Nilai IPM tinggi, perubahan rendah
- ❖ Kuadran III : Nilai IPM rendah, perubahan rendah
- ❖ Kuadran IV : Nilai IPM rendah, perubahan tinggi

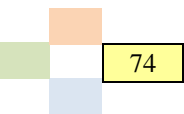
Dari keempat kondisi tersebut, maka tempat pada kuadran I merupakan hal yang diinginkan karena dengan pencapaian IPM yang sudah lebih tinggi dari provinsi juga laju perubahan IPM itu pun lebih tinggi atau lebih cepat daripada laju provinsi. Sebaliknya yang paling memprihatinkan adalah jika kenaikannya lebih rendah daripada laju IPM provinsi secara umum dan IPM-nya pun lebih rendah dari IPM provinsi (posisi pada kuadran III). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia dengan kualitas manusia dibawah rata-rata provinsi lebih rendah laju atau akselerasinya daripada laju pembangunan manusia provinsi secara keseluruhan. Padahal untuk daerah-daerah dengan IPM dibawah angka provinsi, seharusnya akselerasi pembangunan manusianya lebih tinggi atau dipercepat daripada laju pembangunan manusia provinsi untuk mengejar ketertinggalan daerah tersebut.

Gambar 5.12.
 IPM Kabupaten/Kota Tahun 2009 dan
 Perubahan (*Shortfall*) Tahun 2008-2009



Sumber: Badan Pusat Statistik

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Pendapatan adalah salah satu dari pilihan yang dimiliki manusia, tetapi bukanlah suatu totalitas dari semua aspek kehidupan manusia. Aspek kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik yang baik dan kebebasan untuk bertindak juga merupakan hal-hal yang tidak kalah pentingnya (UNDP Human Development Report-HDR, 2001). Sehingga dikembangkanlah konsep IPM yang dianggap sebagai suatu konsep yang lebih komprehensif karena disamping memperhitungkan keberhasilan pembangunan manusia dari aspek nonekonomi, juga memperhitungkan keberhasilan pembangunan manusia dari aspek ekonomi.

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Selama kurun waktu 2008-2009, secara umum kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Gayo Lues mengalami peningkatan yang cukup berarti. Hal ini ditandai dengan naiknya IPM dari 67,17 menjadi 67,71.
2. Kenaikan IPM disebabkan oleh naiknya komponen angka harapan hidup, paritas daya beli, dan indikator pendidikan, meski angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah relatif tidak berubah banyak.
3. Kenaikan IPM juga terjadi pada seluruh kabupaten/kota lainnya. Kenaikan ini juga diikuti oleh semakin kecilnya

variasi yang terjadi antardaerah kabupaten/kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

4. Secara umum, perbedaan antardaerah kabupaten/kota terjadi karena perbedaan karakteristik daerah. Akibatnya juga berimbas pada pembangunan manusia di daerah tersebut.
5. Perbandingan dengan beberapa kabupaten/kota lainnya dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Gayo Lues masih terletak dalam posisi terakhir, dari 23 kabupaten/kota sama seperti tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Gayo Lues masih tertinggal dari kabupaten/kota lainnya di Nanggroe Aceh Darussalam.

6.2. Saran-saran

IPM merupakan indikator penting yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah. Dalam hal ini IPM dianggap sebagai gambaran dari hasil program pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Demikian juga kemajuan program pembangunan dalam suatu periode dapat diukur dan ditunjukkan oleh besaran IPM pada awal dan akhir periode tersebut. IPM merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena memperlihatkan kualitas

penduduk suatu wilayah dalam hal ini harapan hidup, intelegktualitas, dan standar hidup layak.

IPM tidak hanya mengukur pembangunan dari aspek ekonomi saja (diukur dengan kemampuan daya beli terhadap berbagai macam barang dan jasa yang diperlukan untuk mendukung kehidupan yang lebih baik), tetapi juga mengukur pembangunan dari aspek non ekonomi (diukur dengan tingkat kelangsungan hidup yang lebih tinggi dan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki yang semakin tinggi).

Dalam perencanaan pembangunan, IPM juga berfungsi dalam memberikan tuntunan dalam menentukan prioritas dalam merumuskan kebijakan dan menentukan program. Hal ini juga merupakan tuntunan dalam mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebijakan umum yang ditentukan oleh pembuat kebijakan dan pengambil keputusan.

Namun demikian, karena IPM merupakan indeks komposit, dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, indikator ini masih perlu didukung indikator-indikator lainnya, baik indikator sektoral maupun indikator lintas sektoral.

Pembangunan manusia di Kabupaten Gayo Lues belum mengalami kemajuan sebagaimana yang diharapkan. Pada periode awal selepas dari kabupaten induknya (Aceh Tenggara), pembangunan di Kabupaten Gayo Lues relatif lebih lambat dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pembangunan pendidikan masih harus ditingkatkan karena pada umumnya penduduk daerah

ini belum menamatkan program belajar 9 tahun atau tamat SLTP serta tidak meningkatnya angka melek huruf.

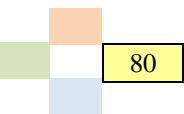
Angka partisipasi sekolah harus ditingkatkan untuk mendongkrak rata-rata lama sekolah. Hal ini dapat diwujudkan jika masyarakat dapat bersekolah hingga menamatkan sekolah tinggi atau paling tidak SLTA/sederajat. Pembangunan sekolah yang mudah diakses masyarakat banyak merupakan sesuatu yang mesti didahulukan.

Peningkatan mutu kesehatan dan kebutuhan gizi masyarakat harus ditingkatkan untuk meningkatkan angka harapan hidup. Pembangunan sarana dan penyediaan prasarana kesehatan di seluruh pelosok (seperti puskesmas, dokter, bidan) mesti digalakkan. Demikian pula sosialisasi dan pendidikan hidup sehat serta sanitasi lingkungan, misalnya pembangunan got atau saluran limbah yang sehat dan bersih.

Sementara itu dalam bidang ekonomi, untuk meningkatkan daya beli masyarakat khususnya, peran serta masyarakat produktif dapat ditingkatkan misalnya dengan memperluas lapangan kerja. Di daerah perdesaan kredit usaha lunak bagi petani atau nelayan dapat digalakkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sehingga daya beli masyarakat meningkat. Peraturan yang mendukung investasi di daerah dan insentif bagi pengusaha juga hendaknya diberlakukan untuk mendorong investasi.

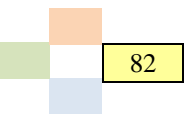
Akhirnya untuk mengejar keteringgalan pembangunan manusia di Kabupaten Gayo Lues, pembangunan kesehatan dan pendidikan harus ditingkatkan. Suatu hal yang tidak boleh

dilupakan adalah menjaga kelestarian alam, terutama kawasan Hutan Lindung Leuser yang tercakup luas dalam wilayah kabupaten ini. Dengan demikian bekal dan modal untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dapat tercapai secara berkesinambungan untuk mewujudkan kemakmuran seluruh rakyat.



Lampiran





Tabel 1.
Luas Wilayah dan Jumlah Desa Menurut Kecamatan
di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2009

Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	% Luas Wilayah	Jumlah Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kuta Panjang	63.325	11,07	12
2. Blang Jerango	17.448	3,05	10
3. Blangkejeren	21.374	3,74	21
4. Putri Betung	139.000	24,30	13
5. Dabun Gelang	27.440	4,80	11
6. Blang Pegayon	46.003	8,04	12
7. Pining	101.660	17,77	9
8. Rikit Gaib	27.341	4,78	13
9. Pantan Cuaca	17.623	3,08	9
10. Terangun	69.084	12,08	24
11. Tripe Jaya	41.660	7,28	10
Gayo Lues	571.958	100,00	144

Sumber: RTRW Kabupaten Gayo Lues 2009-2028

Tabel 2.
Jumlah Penduduk Kabupaten Gayo Lues Tahun 2007-2008

Tahun	Jenis Kelamin		
	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
2007	36.449	37.702	74.151
2008	36.783	38.011	74.794
Perubahan (%)	0,92	0,82	0,87

Sumber: BPS, Gayo Lues Dalam Angka 2009

Tabel 3.
Komposisi Penduduk Kabupaten Gayo Lues Menurut Kecamatan
dan Jenis Kelamin, Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)
dan Luas Wilayah Tahun 2008

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin	Distribusi Penduduk Per Kecamatan (%)
1. Kuta Panjang	3.467	3.778	7.245	91,77	9,69
2. Blang Jerango	3.016	3.254	6.270	92,69	8,38
3. Blangkejeren	10.412	10.862	21.274	95,86	28,44
4. Putri Betung	3.291	3.243	6.534	101,48	8,74
5. Dabun Gelang	2.217	2.199	4.416	100,82	5,90
6. Blang Pegayon	2.437	2.383	4.820	102,27	6,44
7. Pining	2.064	1.987	4.051	103,88	5,42
8. Rikit Gaib	1.803	2.052	3.855	87,87	5,15
9. Pantan Cuaca	1.806	1.711	3.517	105,55	4,70
10. Terangun	3.688	4.047	7.735	91,13	10,34
11. Tripe Jaya	2.582	2.495	5.077	103,49	6,79
Gayo Lues	36.783	38.011	74.794	96,77	100,00

Sumber: BPS, Gayo Lues Dalam Angka 2009

Tabel 4.
Peranan Sektor Ekonomi dalam Pembentukan PDRB
Kabupaten Gayo Lues Tahun 2005–2008 (Persen)

Lapangan Usaha	2005	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	61,05	60,54	59,52	58,73
2. Pertambangan & penggalian	0,07	0,07	0,08	0,08
3. Industri pengolahan	4,15	4,25	4,4	4,56
4. Listrik, gas & air bersih	0,64	0,61	0,58	0,59
5. Bangunan	5,78	5,94	6,08	6,45
6. Perdagangan, hotel & restoran	7,76	7,62	7,56	7,79
7. Pengangkutan & komunikasi	1,92	1,83	1,75	1,76
8. Keuangan, persewaan, & jasa perusahaan	2,09	2,23	2,41	2,45
9. Jasa-jasa	16,54	16,9	17,63	17,59
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Gayo Lues 2009

Tabel 5.
 Persentase Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka
 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009

Kabupaten/Kota	TPAK	TPT
(1)	(2)	(3)
01. Simeulue	56,46	12,42
02. Aceh Singkil	64,81	7,81
03. Aceh Selatan	58,32	9,83
04. Aceh Tenggara	62,06	11,53
05. Aceh Timur	61,78	6,70
06. Aceh Tengah	79,04	4,31
07. Aceh Barat	57,85	4,63
08. Aceh Besar	60,38	13,54
09. Pidie	60,78	6,78
10. Bireuen	65,45	9,05
11. Aceh Utara	61,11	11,00
12. Aceh Barat Daya	59,41	7,21
13. Gayo Lues	63,96	6,56
14. Aceh Tamiang	61,13	9,9
15. Nagan Raya	67,83	4,84
16. Aceh Jaya	67,34	6,39
17. Bener Meriah	74,68	2,57
18. Pidie Jaya	65,04	5,16
71. Banda Aceh	62,93	9,78
72. Sabang	67,25	11,66
73. Langsa	59,64	14,74
74. Lhokseumawe	54,61	13,26
75. Subulussalam	52,98	4,34
Provinsi NAD	62,50	8,71

Sumber: BPS, Sakernas Agt 2009

Tabel 6.
Angka Harapan Hidup Tahun 2005-2009

Kabupaten/Kota	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Simeulue	62,5	62,7	62,75	62,84	62,91
02. Aceh Singkil	63,2	64,0	64,27	64,46	64,69
03. Aceh Selatan	65,7	66,5	66,61	66,71	66,82
04. Aceh Tenggara	68,9	69,1	69,11	69,16	69,19
05. Aceh Timur	69,1	69,3	69,41	69,52	69,63
06. Aceh Tengah	69,1	69,2	69,31	69,42	69,53
07. Aceh Barat	68,9	69,6	69,69	69,78	69,87
08. Aceh Besar	70,0	70,3	70,42	70,52	70,64
09. Pidie	68,4	68,7	68,94	69,11	69,32
10. Bireuen	72,2	72,2	72,22	72,28	72,32
11. Aceh Utara	69,1	69,3	69,41	69,52	69,63
12. Aceh Barat Daya	65,4	66,0	66,30	66,49	66,74
13. Gayo Lues	66,2	66,6	66,73	66,84	66,96
14. Aceh Tamiang	67,8	68,0	68,09	68,18	68,27
15. Nagan Raya	69,1	69,2	69,31	69,42	69,53
16. Aceh Jaya	67,0	67,8	67,84	67,91	67,97
17. Bener Meriah	66,4	67,2	67,31	67,41	67,52
18. Pidie Jaya	-	68,8	68,91	69,02	69,13
71. Banda Aceh	68,7	69,6	69,99	70,24	70,56
72. Sabang	69,6	69,7	70,10	70,36	70,69
73. Langsa	68,9	69,7	69,96	70,14	70,36
74. Lhokseumawe	68,4	69,2	69,70	70,00	70,41
75. Subulussalam	-	65,2	65,40	65,54	65,71
Provinsi NAD	68,0	68,3	68,40	68,50	68,60
Indonesia	68,1	68,5	70,40	70,50	70,70

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 7.
Angka Melek Huruf Menurut
Kabupaten/Kota di NAD Tahun 2005-2009

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Simeulue	94,8	98,3	98,30	98,30	98,58
02. Aceh Singkil	96,2	96,2	96,20	96,20	96,22
03. Aceh Selatan	96,4	96,4	96,42	96,42	96,47
04. Aceh Tenggara	96,9	96,9	96,94	96,94	97,10
05. Aceh Timur	97,2	97,2	97,24	97,35	97,51
06. Aceh Tengah	97,5	97,5	97,47	98,08	98,13
07. Aceh Barat	89,9	89,9	94,06	94,06	94,08
08. Aceh Besar	96,9	96,9	96,93	96,93	96,95
09. Pidie	94,5	94,5	94,53	95,51	95,56
10. Bireuen	96,8	98,3	98,34	98,34	98,37
11. Aceh Utara	94,9	96,0	96,04	96,04	96,42
12. Aceh Barat Daya	95,7	95,7	95,70	96,22	96,25
13. Gayo Lues	86,7	86,7	86,70	86,70	86,97
14. Aceh Tamiang	98,0	98,0	98,00	98,00	98,25
15. Nagan Raya	89,7	89,7	89,70	89,70	89,78
16. Aceh Jaya	89,9	91,1	91,78	93,73	93,78
17. Bener Meriah	96,4	96,4	97,19	97,19	97,45
18. Pidie Jaya	-	94,2	94,20	94,20	94,23
71. Banda Aceh	99,0	99,0	99,03	99,03	99,10
72. Sabang	98,2	98,2	98,26	98,78	98,81
73. Langsa	97,0	98,5	98,75	98,75	99,10
74. Lhokseumawe	98,6	98,8	98,82	98,82	99,22
75. Subulussalam	-	96,5	96,50	96,50	96,53
Provinsi NAD	96,0	96,2	96,20	96,20	96,39
Indonesia	90,9	91,5	91,87	92,19	92,58

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 8.
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Menurut
Kabupaten/Kota di NAD Tahun 2005-2009

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Simeulue	6,1	6,1	7,60	8,00	8.30
02. Aceh Singkil	7,7	7,7	7,70	7,70	7.74
03. Aceh Selatan	8,2	8,2	8,20	8,20	8.28
04. Aceh Tenggara	9,3	9,3	9,30	9,30	9.34
05. Aceh Timur	8,3	8,4	8,40	8,40	8.49
06. Aceh Tengah	8,9	9,0	9,27	9,29	9.44
07. Aceh Barat	8,2	8,2	8,20	8,20	8.23
08. Aceh Besar	9,4	9,4	9,48	9,48	9.51
09. Pidie	8,5	8,6	8,60	8,60	8.65
10. Bireuen	9,1	9,2	9,20	9,20	9.23
11. Aceh Utara	9,0	9,1	9,10	9,10	9.12
12. Aceh Barat Daya	7,4	7,5	7,50	7,50	7.63
13. Gayo Lues	8,6	8,7	8,70	8,70	8.71
14. Aceh Tamiang	8,3	8,4	8,40	8,40	8.77
15. Nagan Raya	6,4	6,7	7,32	7,32	7.34
16. Aceh Jaya	8,7	8,7	8,70	8,70	8.71
17. Bener Meriah	8,0	8,1	8,49	8,49	8.53
18. Pidie Jaya	-	8,0	8,00	8,00	8.38
71. Banda Aceh	11,2	11,2	11,86	11,86	11.91
72. Sabang	9,5	9,6	10,13	10,23	10.36
73. Langsa	9,3	9,4	9,70	9,88	10.04
74. Lhokseumawe	9,7	9,7	9,70	9,70	9.91
75. Subulussalam	-	7,5	7,50	7,50	7.58
Provinsi NAD	8,4	8,5	8,50	8,50	8.63
Indonesia	7,3	7,4	7,47	7,52	7.72

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 9.
Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2009

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+ Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
7-12	99,32	99,20	99,26
13-15	94,38	97,62	96,14
16-18	75,93	80,26	78,00
19-24	16,07	14,78	15,42

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2009

Tabel 10.
 Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan
 Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2009

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jenis Kelamin		Laki-laki dan Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tdk punya ijazah SD	9,78	20,98	15,54
SD	11,14	9,82	10,46
MI	24,21	24,92	24,58
SMP Umum/Kejuruan	0,96	0,16	0,55
MTs	23,39	22,80	23,08
SMA	0,62	0,78	0,70
MA	21,71	12,46	16,95
SMK	0,79	0,91	0,85
Dipl I/II	0,57	0,31	0,44
Dipl III/Sarjana muda	2,10	2,65	2,38
Dipl IV/S1	0,33	1,88	1,13
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2009

Tabel 11. Pengeluaran Riil Per Kapita Disesuaikan
Tahun 2005-2009 (Rp ribu)

Kabupaten/Kota	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Simeulue	603,4	606,7	613,41	617,07	617.10
02. Aceh Singkil	595,9	599,1	607,59	608,18	608.22
03. Aceh Selatan	588,7	591,8	596,92	600,21	604.59
04. Aceh Tenggara	586,0	589,1	593,99	594,03	596.01
05. Aceh Timur	569,8	572,9	579,33	580,16	586.29
06. Aceh Tengah	594,2	597,3	606,22	612,61	615.51
07. Aceh Barat	580,9	584,0	586,91	591,18	598.72
08. Aceh Besar	593,2	596,3	605,60	606,50	608.63
09. Pidie	594,9	598,0	606,32	608,11	611.05
10. Bireuen	581,6	584,7	587,78	589,40	592.06
11. Aceh Utara	587,2	590,3	601,82	602,19	605.69
12. Aceh Barat Daya	589,5	592,7	601,49	611,73	614.26
13. Gayo Lues	587,7	590,9	596,10	596,44	600.15
14. Aceh Tamiang	575,6	578,7	583,72	591,29	595.40
15. Nagan Raya	583,1	586,2	589,38	599,28	601.67
16. Aceh Jaya	581,6	584,7	588,36	591,47	596.69
17. Bener Meriah	580,9	584,0	587,03	597,84	603.78
18. Pidie Jaya	-	596,2	602,87	618,56	620.18
71. Banda Aceh	621,0	624,3	626,44	630,25	630.63
72. Sabang	615,1	618,4	620,65	623,14	625.82
73. Langsa	588,4	591,5	595,18	599,51	600.66
74. Lhokseumawe	618,2	621,5	628,30	630,77	631.63
75. Subulussalam	-	599,9	604,56	605,35	608.74
Provinsi NAD	588,9	589,5	600,95	605,56	610,27
Indonesia	619,9	621,3	624,37	628,33	631,46

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 12.
 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Reduksi *Shortfall*
 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2008-2009

Kabupaten/Kota	IPM		Reduksi <i>Shortfall</i> 2008-2009	Peringkat di Provinsi NAD	
	2008	2009		2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Simeulue	68,60	68,92	1,04	19	19
02. Aceh Singkil	68,12	68,29	0,52	22	22
03. Aceh Selatan	69,18	69,64	1,51	17	17
04. Aceh Tenggara	70,99	71,23	0,81	11	11
05. Aceh Timur	69,55	70,19	2,09	15	15
06. Aceh Tengah	72,81	73,22	1,50	5	4
07. Aceh Barat	69,66	70,32	2,16	14	14
08. Aceh Besar	72,84	73,10	0,94	4	6
09. Pidie	71,21	71,60	1,36	10	10
10. Bireuen	72,60	72,86	0,93	7	7
11. Aceh Utara	71,47	71,90	1,50	8	8
12. Aceh Barat Daya	69,38	69,81	1,41	16	16
13. Gayo Lues	67,17	67,59	1,28	23	23
14. Aceh Tamiang	69,81	70,50	2,31	12	12
15. Nagan Raya	68,47	68,74	0,88	20	21
16. Aceh Jaya	68,94	69,39	1,46	18	18
17. Bener Meriah	69,77	70,38	2,01	13	13
18. Pidie Jaya	71,23	71,71	1,66	9	9
71. Banda Aceh	76,74	77,00	1,10	1	1
72. Sabang	75,00	75,49	1,97	3	3
73. Langsa	72,79	73,20	1,51	6	5
74. Lhokseumawe	75,00	75,54	2,16	2	2
75. Subulussalam	68,42	68,85	1,34	21	20
Provinsi NAD*	70,76	71,31	1,90	17	17

Catatan: * Peringkat provinsi se-Indonesia
 Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 13.

IPM Menurut Katagori (Provinsi NAD) dan Kabupaten/Kota Tahun 2007-2009

Kabupaten/Kota	Katagori IPM		
	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Simeulue	Rendah	Rendah	Rendah
02. Aceh Singkil	Rendah	Rendah	Rendah
03. Aceh Selatan	Rendah	Rendah	Rendah
04. Aceh Tenggara	Tinggi	Tinggi	Tinggi
05. Aceh Timur	Rendah	Rendah	Rendah
06. Aceh Tengah	Tinggi	Tinggi	Tinggi
07. Aceh Barat	Rendah	Rendah	Rendah
08. Aceh Besar	Tinggi	Tinggi	Tinggi
09. Pidie	Tinggi	Tinggi	Tinggi
10. Bireuen	Tinggi	Tinggi	Tinggi
11. Aceh Utara	Tinggi	Tinggi	Tinggi
12. Aceh Barat Daya	Rendah	Rendah	Rendah
13. Gayo Lues	Rendah	Rendah	Rendah
14. Aceh Tamiang	Rendah	Rendah	Rendah
15. Nagan Raya	Rendah	Rendah	Rendah
16. Aceh Jaya	Rendah	Rendah	Rendah
17. Bener Meriah	Rendah	Rendah	Rendah
18. Pidie Jaya	Rendah	Tinggi	Tinggi
71. Banda Aceh	Tinggi	Tinggi	Tinggi
72. Sabang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
73. Langsa	Tinggi	Tinggi	Tinggi
74. Lhokseumawe	Tinggi	Tinggi	Tinggi
75. Subulussalam	Rendah	Rendah	Rendah

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 14.
IPM 2009, Perubahan (*Shortfall*) 2008-2009, dan Letak Kuadran

Kabupaten/Kota	IPM 2009		Perubahan 2008-2009	Letak Kuadran
	Nilai IPM	Kategori		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Simeulue	68,92	Rendah	1,53	III
02. Aceh Singkil	68,29	Rendah	1,92	IV
03. Aceh Selatan	69,64	Rendah	1,39	III
04. Aceh Tenggara	71,23	Tinggi	1,09	II
05. Aceh Timur	70,19	Rendah	2,01	IV
06. Aceh Tengah	73,22	Tinggi	1,51	II
07. Aceh Barat	70,32	Rendah	2,02	IV
08. Aceh Besar	73,10	Tinggi	1,03	II
09. Pidie	71,60	Tinggi	1,45	II
10. Bireuen	72,86	Tinggi	1,00	II
11. Aceh Utara	71,90	Tinggi	1,69	II
12. Aceh Barat Daya	69,81	Rendah	1,41	III
13. Gayo Lues	67,59	Rendah	1,64	III
14. Aceh Tamiang	70,50	Rendah	1,74	III
15. Nagan Raya	68,74	Rendah	1,31	III
16. Aceh Jaya	69,39	Rendah	1,49	III
17. Bener Meriah	70,38	Rendah	2,01	VI
18. Pidie Jaya	71,71	Tinggi	1,66	II
71. Banda Aceh	77,00	Tinggi	1,10	II
72. Sabang	75,49	Tinggi	1,97	I
73. Langsa	73,20	Tinggi	1,24	II
74. Lhokseumawe	75,54	Tinggi	1,26	II
75. Subulussalam	68,85	Rendah	1,89	III
Provinsi NAD	71,31	Rendah	1,90	-

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 15.
Konversi Lama Sekolah Dengan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Lama Sekolah (tahun)
(1)	(2)	(3)
1	Tidak/belum pernah sekolah	0
2	SD	6
3	SMP	9
4	SLTA/SMU	12
5	Diploma I	13
6	Diploma II	14
7	Akademi/Diploma III	15
8	Diploma IV/Sarjana	16
9	Magister (S2)	18
10	Doktor (S3)	21

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 16.
Daftar Komoditi Terpilih Untuk Menghitung
Paritas Daya Beli (PPP)

No	Komoditi	Unit	Sumbangan terhadap total konsumsi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Beras Lokal	Kg	7,25
2	Tepung terigu	Kg	0,10
3	Ketela Pohon	Kg	0,22
4	Ikan tongkol/tuna/cakalang	Kg	0,50
5	Ikan teri	Ons	0,32
6	Daging Sapi	Kg	0,78
7	Daging ayam kampung	Kg	0,65
8	Telur ayam	Butir	1,48
9	Susu Kental Manis	395 gram	0,48
10	Bayam	Kg	0,30
11	Kacang panjang	Kg	0,32
12	Kacang tanah	Kg	0,22
13	Tempe	Kg	0,79
14	Jeruk	Kg	0,39
15	Pepaya	Kg	0,18
16	Kelapa	Butir	0,56
17	Gula pasir	Ons	1,61
18	Kopi bubuk	Ons	0,60
19	Garam	Ons	0,15
20	Merica/lada	Ons	0,13
21	Mie instant	80 gram	0,79
22	Rokok kretek filter	10 batang	2,86
23	Listrik	Kwh	2,06
24	Air minum	M ³	0,46
25	Bensin	Liter	1,02
26	Minyak tanah	Liter	1,74
27	Sewa rumah	Unit	11,56
Total			37,52

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 17.
Pengeluaran Per Kapita Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2007 (Rp/bulan/kapita)

Kabupaten/Kota	Minimum	Rata-rata	Maksimum
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Simeulue	125.994,05	272.255,97	786.980,16
02. Aceh Singkil	99.039,68	280.498,37	1.370.607,14
03. Aceh Selatan	115.714,29	279.418,23	1.261.684,52
04. Aceh Tenggara	77.142,86	226.050,85	1.033.404,76
05. Aceh Timur	56.040,82	263.312,14	1.151.283,33
06. Aceh Tengah	137.879,25	319.722,64	1.044.071,43
07. Aceh Barat	124.933,04	385.649,70	1.171.428,57
08. Aceh Besar	64.702,38	333.557,28	1.277.797,62
09. Pidie	128.802,72	311.921,93	1.282.976,19
10. Bireuen	81.243,39	274.662,19	908.083,33
11. Aceh Utara	82.267,01	258.461,88	1.859.675,60
12. Aceh Barat Daya	76.609,52	252.276,27	1.419.130,95
13. Gayo Lues	87.490,08	232.168,07	1.149.285,71
14. Aceh Tamiang	76.962,59	265.861,97	2.808.928,57
15. Nagan Raya	72.969,39	297.542,56	1.412.714,29
16. Aceh Jaya	94.365,08	327.972,86	2.557.761,90
17. Bener Meriah	108.804,29	286.200,61	874.005,95
18. Pidie Jaya	131.950,53	292.646,07	945.035,71
71. Banda Aceh	225.035,71	715.070,94	5.829.095,24
72. Sabang	116.507,94	433.966,90	2.806.644,05
73. Langsa	80.729,17	349.286,92	3.467.309,52
74. Lhokseumawe	63.544,64	357.066,30	2.075.770,83
75. Subulussalam	72.345,24	247.065,33	1.545.142,86
Provinsi NAD	56.040,82	310.841,47	5.829.095,24

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Tabel 18.
IPM Indonesia Menurut Provinsi
Tahun 2005-2008

Provinsi	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. Nanggroe Aceh Drsslm	69,0	69,41	70,35	70,76	71,31
12. Sumatera Utara	72,0	72,46	72,78	73,29	73,80
13. Sumatera Barat	71,2	71,65	72,23	72,96	73,44
14. Riau	73,6	73,81	74,63	75,09	75,60
15. Jambi	71,0	71,29	71,46	71,99	72,45
16. Sumatera Selatan	70,2	71,09	71,40	72,05	72,61
17. Bengkulu	71,1	71,28	71,57	72,14	72,55
18. Lampung	68,8	69,38	69,78	70,30	70,93
19. Bangka Belitung	70,7	71,18	71,62	72,19	72,55
20. Kepulauan Riau	72,2	72,79	73,68	74,18	74,54
31. DKI Jakarta	76,1	76,33	76,59	77,03	77,36
32. Jawa Barat	69,9	70,32	70,71	71,12	71,64
33. Jawa Tengah	69,8	70,25	70,92	71,60	72,10
34. D. I. Yogyakarta	73,5	73,70	74,15	74,88	75,23
35. Jawa Timur	68,4	69,18	69,78	70,38	71,06
36. Banten	68,8	69,11	69,29	69,70	70,06
51. Bali	69,8	70,07	70,53	70,98	71,52
52. Nusa Tenggara Barat	62,4	63,04	63,71	64,12	64,66
53. Nusa Tenggara Timur	63,6	64,83	65,36	66,15	66,60
61. Kalimantan Barat	66,2	67,08	67,53	68,17	68,79
62. Kalimantan Tengah	73,2	73,40	73,49	73,88	74,36
63. Kalimantan Selatan	67,4	67,75	68,01	68,72	69,30
64. Kalimantan Timur	72,9	73,26	73,77	74,52	75,11
71. Sulawesi Utara	74,2	74,37	74,68	75,16	75,68
72. Sulawesi Tengah	68,5	68,85	69,34	70,09	70,70
73. Sulawesi Selatan	68,1	68,81	69,62	70,22	70,94
74. Sulawesi Tenggara	67,5	67,80	68,32	69,00	69,52
75. Gorontalo	67,5	68,01	68,83	69,29	69,79
76. Sulawesi Barat	65,7	67,06	67,72	68,55	69,18
81. Maluku	69,2	69,69	69,96	70,38	70,96
82. Maluku Utara	67,0	67,51	67,82	68,18	68,63
91 Papua Barat	64,8	66,08	67,28	67,95	68,58
94. Papua	62,1	62,75	63,41	64,00	64,53

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 19. IPM/HDI (Human Development Index) Beberapa Negara Tahun 2007

Rank (1)	Country (2)	Value (3)	Rank (1)	Country (2)	Value (3)
HUMAN DEVELOPMENT			HIGH HUMAN DEVELOPMENT		
1	Norway	0.971	39	Bahrain	0.895
2	Australia	0.970	40	Estonia	0.893
3	Iceland	0.969	41	Poland	0.892
4	Canada	0.968	42	Slovenia	0.892
5	Ireland	0.965	43	Hungary	0.879
6	Netherlands	0.964	44	Chile	0.878
7	Sweden	0.963	45	Croatia	0.871
8	France	0.961	46	Lithuania	0.870
9	Switzerland	0.960	47	Antigua and Barbuda	0.869
10	Japan	0.960	48	Latvia	0.868
11	Luxembourg	0.960	49	Argentina	0.866
12	Finland	0.959	50	Uruguay	0.865
13	United States	0.958	51	Cuba	0.863
14	Austria	0.955	52	Bahamas	0.859
15	Spain	0.955	53	Mexico	0.854
16	Denmark	0.955	54	Costa Rica	0.854
17	Belgium	0.953	55	Libyan Arab Jamahiriya	0.849
18	Italy	0.951	56	Oman	0.848
19	Liechtenstein	0.951	57	Seychelles	0.848
20	New Zealand	0.950	58	Venezuela (Bolivarian Republic of)	0.844
21	United Kingdom	0.949	59	Saudi Arabia	0.843
22	Germany	0.949	60	Panama	0.843
23	Singapore	0.944	61	Bulgaria	0.843
24	Hong Kong, China (SAR)	0.944	62	Saint Kitts and Nevis	0.839
25	Greece	0.942	63	Romania	0.837
26	Korea (Republic of)	0.937	64	Trinidad and Tobago	0.837
27	Israel	0.935	65	Montenegro	0.834
28	Andorra	0.934	66	Malaysia	0.829
29	Slovenia	0.929	67	Serbia	0.829
30	Brunei Darussalam	0.928	68	Belarus	0.829
31	Kuwait	0.926	69	Saint Lucia	0.821
32	Cyprus	0.924	70	Albania	0.819
33	Costa Rica	0.920	71	Russian Federation	0.817
34	Portugal	0.919	72	The former Yugoslav Republic of Macedonia	0.817
35	United Arab Emirates	0.919	73	Dominica	0.814
36	Czech Republic	0.919	74	Grenada	0.813
37	Barbados	0.919	75	Brazil	0.813
38	Malta	0.912	76	Bosnia and Herzegovina	0.812

Lanjutan Tabel 19. ...

Rank (1)	Country (2)	Value (3)	Rank (1)	Country (2)	Value (3)
HIGH HUMAN DEVELOPMENT			MEDIUM HUMAN DEVELOPMENT		
77	Colombia	0.807	114	Guyana	0.729
78	Peru	0.806	115	Mongolia	0.727
79	Turkey	0.806	116	Vietnam	0.725
80	Ecuador	0.806	117	Moldova	0.720
81	Mauritius	0.804	118	Equatorial Guinea	0.719
82	Kazakhstan	0.804	119	Uzbekistan	0.710
83	Lebanon	0.803	120	Kirgizstan	0.710
MEDIUM HUMAN DEVELOPMENT			121	Cape Verde	0.708
84	Armenia	0.798	122	Guatemala	0.704
85	Ukraine	0.796	123	Egypt	0.703
86	Azerbaijan	0.787	124	Nicaragua	0.699
87	Thailand	0.783	125	Botswana	0.694
88	Iran (Islamic Republic of)	0.782	126	Vanuatu	0.693
89	Georgia	0.778	127	Tajikistan	0.688
90	Dominican Republic	0.777	128	Namibia	0.686
91	Saint Vincent and the Grenadines	0.772	129	South Africa	0.683
92	China	0.772	130	Morocco	0.654
93	Belize	0.772	131	Sao Tome and Principe	0.651
94	Samoa	0.771	132	Bhutan	0.619
95	Maldives	0.771	133	Laos People's Democratic Republic	0.619
96	Jordan	0.770	134	India	0.612
97	Suriname	0.769	135	Solomon Islands	0.610
98	Tunisia	0.769	136	Congo	0.601
99	Tonga	0.768	137	Cambodia	0.593
100	Jamaica	0.766	138	Myanmar	0.586
101	Paraguay	0.761	139	Comoros	0.576
102	Sri Lanka	0.759	140	Yemen	0.575
103	Gabon	0.755	141	Pakistan	0.572
104	Algeria	0.754	142	Swaziland	0.572
105	Philippines	0.751	143	Angola	0.564
106	El Salvador	0.747	144	Nepal	0.553
107	Syrian Arab Republic	0.742	145	Madagascar	0.543
108	Fiji	0.741	146	Bangladesh	0.543
109	Turkmenistan	0.739	147	Kenya	0.541
110	Occupied Palestinian Territories	0.737	148	Papua New Guinea	0.541
111	Indonesia	0.734	149	Haiti	0.532
112	Honduras	0.732	150	Sudan	0.531
113	Bolivia	0.729	151	Tanzania (United Republic of)	0.530

Lanjutan Tabel 19. ...

Rank (1)	Country (2)	Value (3)	Rank (4)	Country (5)	Value (6)
MEDIUM HUMAN DEVELOPMENT			OTHER UN MEMBER STATES		
52	Ghana	0.524	106	Monaco	-
53	Cameroon	0.523	107	Nauru	-
54	Mauritania	0.521	108	Palau	-
55	Djibouti	0.520	109	San Marino	-
56	Lesotho	0.514	110	Somalia	-
57	Uganda	0.514	111	Tuvalu	-
58	Nigeria	0.511	112	Zimbabwe	-
ALL DEVELOPMENT			Africa		0.447
59	Togo	0.489	Asia		0.704
60	Mali	0.487	Europe		0.802
61	Benin	0.482	Latin America and the Caribbean		0.821
62	Timor-Leste	0.481	North America		0.962
63	Côte d'Ivoire	0.484	Oceania		0.900
64	Zambia	0.481			
65	Eritrea	0.482	Arab States		0.719
66	Senegal	0.484	GCC		0.888
67	Rwanda	0.488	Central and Eastern Europe and the CIS		0.821
68	Gambia	0.484	CIS		0.802
69	Liberia	0.482	East Asia and the Pacific		0.770
70	Guinea	0.485	Latin America and the Caribbean		0.821
71	Ethiopia	0.444	South Asia		0.812
72	Mozambique	0.482	Sub-Saharan Africa		0.414
73	Guinea-Bissau	0.388			
74	Burundi	0.384	OECD		0.982
75	Chad	0.382	European Union (EU 27)		0.987
76	Congo (Democratic R)	0.388			
77	Burkina Faso	0.388	Very high human development		0.964
78	Mali	0.311	Very high OECD		-
79	Central African Republic	0.388	Very high non-OECD		-
80	Sierra Leone	0.345	High human development		0.888
81	Afghanistan	0.252	Medium human development		0.688
82	Niger	0.348	Low human development		0.428
OTHER UN MEMBER STATES					
101	Inq	-	World		0.763
102	Finland	-			
103	orea (Democratic Pe	-			
104	Marshall Islands	-			
105	Micronesia (Federated	-			

Sumber: Human Development Report 2009, UNDP

DAFTAR ISTILAH PENTING

Akses terhadap air bersih

Persentase rumahtangga yang menggunakan air minum yang berasal dari air mineral, air leding/PAM, pompa air, sumur atau mata air yang terlindung.

Akses terhadap fasilitas kesehatan

Persentase rumahtangga yang tinggal pada jarak kurang dari 5 kilometer dari fasilitas kesehatan (rumahsakit, klinik, puskesmas, dokter, juru rawat, bidan yang terlatih, paramedic, dan sebagainya).

Akses terhadap sanitasi

Persentase rumahtangga yang memiliki kamar mandi sendiri atau dapat menggunakan fasilitas kamar mandi umum.

Angka buta huruf (dewasa)

Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang tidak dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Dihitung dengan cara 100 dikurang dengan angka melek huruf (dewasa).

Angka harapan hidup pada waktu lahir (e^0)

Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

Angka melek huruf (dewasa)

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

Angka partisipasi sekolah

Proporsi dari keseluruhan penduduk dari berbagai kelompok usia tertentu (7-12, 13-15, 16-18, 19-24) yang masih duduk di bangku sekolah.

Angka putus sekolah

Proporsi penduduk yang berusia antara 7 hingga 15 tahun yang tidak terdaftar pada berbagai tingkatan pendidikan dan tidak menyelesaikan sekolah dasar atau sekolah menengah tingkat pertama.

Garis kemiskinan

Nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non-pangan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk hidup secara layak.

Indeks daya beli

Salah satu dari tiga komponen indeks pembangunan manusia yang didasarkan pada paritas daya beli (PPP) disesuaikan dengan rumus Atkinson. Nilai indeks berkisar antara 0-100.

Indeks harapan hidup

Salah satu dari tiga komponen indeks pembangunan manusia. Nilai indeks ini berkisar antara 0-100.

Indeks harga konsumen (IHK)

Indeks yang menunjukkan perbandingan relative antara tingkat harga pada saat bulan survey dan tingkat harga pada bulan sebelumnya, yang ditimbang dengan nilai konsumsi pada kedua bulan tersebut. IHK dihitung dengan formula Laspeyres yang dikembangkan.

Indeks pembangunan manusia (IPM)

Indeks komposit yang disusun dari tiga indikator: lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; dan standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita (PPP rupiah). Nilai indeks berkisar antara 0 – 100.

Indek pendidikan

Salah satu dari tiga komponen indeks pembangunan manusia. Indeks ini didasarkan pada kombinasi antara angka melek huruf dikalangan penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah. Nilai indeks tersebut berkisar antara 0 – 100

Konsumsi rumahtangga

Dibedakan atas konsumsi makanan dan bukan makanan, mencakup semua barang dan jasa yang dikonsumsi tanpa memperhatikan asalnya tetapi terbatas hanya pada barang/jasa untuk kebutuhan rumahtangga saja, artinya tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Konsumsi total

Konsumsi barang-barang dan jasa-jasa dengan mengabaikan asal barang dan jasa tersebut. Konsumsi total juga mencakup pemberian dan barang/jasa yang diproduksi sendiri oleh rumahtangga yang bersangkutan. Dalam laporan ini, konsumsi total merujuk pada konsumsi bulanan.

Paritas daya beli (*purchasing power parity – PPP*)

PPP memungkinkan dilakukannya perbandingan harga-harga riil antar propinsi dan antar kabupaten, mengingat nilai tukar yang biasa digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli yang terukur dari konsumsi perkapita yang telah disesuaikan. Dalam konteks PPP untuk Indonesia, satu rupiah di satu propinsi memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. PPP dihitung berdasarkan pengeluaran riil per kapita setelah disesuaikan dengan indeks harga konsumen dan penurunan utilitas marginal yang dihitung dengan rumus Atkinson.

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan

a. Tidak/belum pernah sekolah

Mereka yang tidak atau belum pernah sekolah. Termasuk mereka yang tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak yang tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.



- b. Tidak/belum tamat Sekolah Dasar
Mereka yang pernah sekolah tetapi tidak/belum tamat di Sekolah Dasar 5/6/7 tahun.
- c. Tamat Sekolah Dasar
Mereka yang tamat Sekolah Dasar 5/6/7 tahun.
- d. Tamat Sekolah Menengah Tingkat Pertama Umum/Kejuruan
Mereka yang tamat sekolah Menengah Tingkat Pertama Umum/Kejuruan.
- e. Tamat Sekolah Menengah Tingkat Atas Umum/Kejuruan
Mereka yang tamat Sekolah Menengah Tingkat Atas Umum/Kejuruan
- f. Tamat Akademi
Mereka yang tamat pendidikan Sarjana Muda dan DIII.
- g. Tamat Universitas
Mereka yang tamat program pendidikan Sarjana, Pasca Sarjana, Doktor, Diploma IV, dan seterusnya.

Penduduk yang masih bersekolah

Mereka yang sedang mengikuti pendidikan di tingkat pendidikan tertentu.

Penduduk putus sekolah

Mereka yang tidak dapat menamatkan suatu jenjang pendidikan.

Pengeluaran untuk makanan

Proporsi pengeluaran yang dipergunakan untuk mengkonsumsi makanan dibandingkan dengan total pengeluaran (makanan dan bukan makanan).

Pertumbuhan penduduk

Keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi banyaknya penduduk. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu kelahiran, kematian dan migrasi.

Laju pertumbuhan alamiah

Laju pertumbuhan yang hanya dipengaruhi oleh faktor alamiah, yaitu kelahiran dan kematian.

Pertumbuhan ekonomi

Perubahan relative nilai riil produk domestik bruto dalam suatu periode tertentu.

Produk domestik bruto

Jumlah nilai tambah bruto (total output dari barang dan jasa) yang diproduksi oleh semua sektor ekonomi disuatu negara selama periode waktu tertentu.

Produk domestik bruto atas harga berlaku

Merujuk pada nilai produk domestik bruto berdasarkan nilai uang yang berlaku pada tahun tertentu

Produk domestik bruto atas harga konstan

Merujuk pada nilai produk domestik bruto berdasarkan nilai uang pada tahun yang dipergunakan sebagai tahun dasar.

Produk domestik bruto per kapita

Nilai dari produk domestik bruto dibagi dengan jumlah penduduk pada tengah tahun.

Penduduk usia sekolah

Mereka yang pada usia sekolah normal sesuai dengan tingkat pendidikan. Misalnya: penduduk usia SD adalah 7 – 12 tahun, penduduk usia SMTP adalah 13 – 15 tahun dan penduduk usia SMTA adalah 16 – 18 tahun.

Pengeluaran rumahtangga sebulan

Semua biaya yang dikeluarkan rumahtangga selama sebulan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumahtangga.

Rata-rata lama sekolah

Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Tamat sekolah

Mereka yang menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi, tetapi jika ia mengikuti ujian akhir dan lulus maka dianggap tamat sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gayo Lues. 2009. *Gayo Lues Dalam Angka 2009*. Blang Kejeren: BPS Kabupaten Gayo Lues.
- BPS. 2007. *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 1999-2005*. Jakarta: BPS.
- BPS, UNDP Bappenas. 2001. *Indonesia Laporan Pembangunan Manusia 2001*. Jakarta: BPS.
- BPS Kabupaten Gayo Lues. 2009. *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Gayo Lues Tahun 2006-2009*. Blang Kejeren: BPS Kabupaten Gayo Lues.
- BPS Kota Batam. 2000. *Indeks Pembangunan Manusia Kota Batam Tahun 1999*. Kota Batam: 2000.
- BPS Kota Jambi. 2005. *Indeks Pembangunan Manusia Kota Jambi 1999, 2002 dan 2004*. Kota Jambi: 2005
- Sahdan, Gregorius. 2005. *Menanggulangi Kemiskinan Desa*. Jurnal Ekonomi Rakyat. www.ekonomirakyat.org.
- Suhartono, Gedsiri. 2006. *Indeks Pembangunan Manusia 2006*. DE-WORLD.de.
- Tjiptoherijanto, Prijono dan Soesetyo. 1996. *Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Todaro, Michael P, Stephen C. Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. (Jilid 1 dan 2, Terjemahan Haris Munandar). Jakarta: Erlangga.
- UNDP. 2007. *Human Development Report 2006-2007: The Human Development Index*.
- UNDP. 2009. *Human Development Report 2009: The Human Development Index*.



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN GAYO LUES**

Jl. Brig. Pol. Riduan Karim No. 34
Sentang, Blangkejeren 24653

Email: bps1113@bps.go.id, bps1113@yahoo.com